

Menyulam Harmoni



Buku Saku Sosialisasi & Implementasi
Forum Pembauran Kebangsaan



Deni Daelani

Deni Daelani, S.H., M.I.Kom.

Menyulam
HARMONI

Buku Saku Sosialisasi dan Implementasi
----- Forum Pembauran Kebangsaan



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

MENYULAM HARMONI

Buku Saku Sosialisasi dan Implementasi Forum Pembauran Kebangsaan

Copyright @2025 By Deni Daelani, S.H., M.I.Kom.

All right reserved

Penulis

Deni Daelani, S.H., M.I.Kom.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)

[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-202-583-3

Cetakan ke-1, Juli 2025

14,8 x 21 cm, x + 136 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PRAKATA

BUPATI TASIKMALAYA

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Segala puji bagi Allāh Subhānahu wa Ta'ālā, Tuhan yang Maha kuasa, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Menyulam Harmoni ini dapat terbit di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita habibana wanabiyana Muḥammad ṣallallāhu 'alaihi wasallam, suri teladan agung yang menuntun umat manusia menuju kehidupan yang penuh kedamaian dan persaudaraan.

Sebagai Bupati Tasikmalaya, saya menyambut gembira lahirnya karya saudara Deni Daelani, S.H., M.I.Kom. — tokoh muda inspiratif sekaligus Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tasikmalaya. Buku ini hadir pada saat yang sangat tepat, ketika bangsa Indonesia memerlukan penguat kohesi sosial untuk menjaga keberagaman sebagai anugerah, bukan sumber perpecahan.

Kabupaten Tasikmalaya dikenal kaya tradisi keagamaan, seni, dan nilai gotong royong. Namun, era digital, mobilitas penduduk, dan disrupsi informasi menuntut inovasi baru agar nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup. Menyulam

Harmoni menawarkan jawaban dengan merumuskan pembauran kebangsaan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang empiris, sistematis, dan relevan.

Penulis memadukan teori integrasi sosial dengan kisah lapangan yang terjadi di desa-desa, pesantren, hingga ruang publik Tasikmalaya. Pendekatan ini menjadikan buku bukan sekadar wacana akademik, melainkan panduan operasional bagi:

1. Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan inklusif.
2. Tokoh agama dan adat untuk memediasi keragaman keyakinan.
3. Komunitas *pemuda dalam menginisiasi program lintas budaya*.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen mendukung setiap ikhtiar kolaboratif yang diuraikan Deni Daelani. Kami yakin, FPK—dengan jejaring tokoh agama, adat, perempuan, dankaum muda—akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam:

1. Pencegahan konflik berbasis identitas.
2. Literasi kebangsaan di sekolah-sekolah dan pesantren.
3. Revitalisasi *budaya lokal agar selaras dengan tuntutan global*.

Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan buku ini cermin kolektif sekaligus kompas gerak. Mari memperkuat Tasikmalaya sebagai kabupaten yang religius, produktif, dan terbuka—di mana perbedaan suku, agama, maupun profesi dipayungi spirit gotong royong dan silih asah, silih asih, silih asuh, menuju **Tasik Maju Era Baru**.

Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada Saudara Deni Daelani atas dedikasi dan kerja kerasnya. Semoga buku ini

membawa manfaat luas, menginspirasi inovasi sosial, dan meneguhkan semangat Bhineka Tunggal Ika di setiap hati warga Tasikmalaya.

Wassalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Tasikmalaya, Juli 2025

Bupati Tasikmalaya

H. Cecep Nur Yakin

PENGANTAR PENULIS

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, saya persembahkan buku saku ini sebagai wujud ikhtiar kecil dalam merawat kebangsaan melalui jalur sosial dan edukatif. Buku *Menyulam Harmoni* lahir dari realita bahwa kebinekaan Indonesia bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga tantangan masa kini dan masa depan yang membutuhkan upaya strategis, sistematis, dan partisipatif dari semua elemen masyarakat.

Sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tasikmalaya, saya sangat mencermati bagaimana harmoni antarsuku, antaragama, dan antarbudaya di Indonesia, bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Ia adalah hasil dari kerja keras, dialog, kesediaan untuk saling memahami, dan keberanian untuk menumbuhkan kepercayaan dalam perbedaan. Buku ini menjadi jawaban atas kebutuhan akan panduan praktis dan inspiratif untuk memperkuat Forum Pembauran Kebangsaan sebagai salah satu instrumen negara dalam mencegah konflik berbasis identitas dan membangun masyarakat yang inklusif.

Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menjadi pijakan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan FPK di daerah. Namun di balik regulasi itu, tersimpan potensi besar untuk mendorong perubahan sosial, memperluas ruang kolaborasi antar elemen masyarakat, dan menumbuhkan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk yang lebih hidup dan membumi. Buku ini berupaya memadukan nilai-nilai teoritis dengan praktik lapangan, sehingga dapat digunakan oleh aparaturnya pemerintahan, tokoh masyarakat, guru, pemuda, dan seluruh warga yang peduli pada harmoni kebangsaan.

Saya menyadari buku ini belum sempurna. Namun, besar harapan saya agar *Menyulam Harmoni* dapat menjadi jembatan yang menghubungkan semangat nasionalisme dengan kerja nyata di tingkat lokal. Mari bersama-sama menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan hambatan; sebagai jembatan, bukan jurang pemisah.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, semangat, dan ruang kolaborasi dalam penyusunan buku ini. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya dalam membangun Indonesia yang lebih damai, adil, dan bersatu.

Tasikmalaya, Juni 2025

Deni Daelani, S.H., M.I.Kom.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten
Tasikmalaya

DAFTAR ISI

PRAKATA BUPATI TASIKMALAYA	i
PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Mengenal Indonesia: Negara Bhineka Tunggal Ika	1
1.2 Mengapa Pembauran Kebangsaan Itu Penting	7
1.3 Apa Itu Forum Pembauran Kebangsaan	11
BAB 2 PEMBAURAN KEBANGSAAN: KONSEP TEORI DAN PRAKTEK	17
2.1 Definisi dan Konsep Dasar Pembauran Kebangsaan	18
2.2 Teori-Teori Integrasi Sosial dan Kebangsaan	21
2.3 Menjaga Identitas Budaya dalam Integrasi Nasional	26
2.4 Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan	31
BAB 3 PERAN STRATEGIS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)	37
3.1 Fungsi dan Tugas FPK di Berbagai Tingkatan Pemerintahan	37
3.2 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Forum Pembauran Kebangsaan	43

3.3	Kriteria Pemilihan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan -----	48
3.4	Sinergi Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, dan Masyarakat-----	54
3.5	Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan-----	60

BAB 4 IMPLEMENTASI FORUM PEMBAURAN

KEBANGSAAN DI TINGKAT DAERAH ----- 67

4.1	Strategi Pembauran di Tingkat Kabupaten/Kota-----	68
4.2	Strategi Pembauran di Tingkat Kecamatan-----	69
4.3	Strategi Pembauran di Tingkat Desa/Kelurahan ---	70
4.4	Studi Kasus: Keberhasilan Pembauran di Berbagai Daerah-----	71

BAB 5 STRATEGI EFEKTIF SOSIALISASI DAN

KOMUNIKASI ----- 75

5.1	Teknik dan Metode Efektif dalam Sosialisasi -----	76
5.2	Komunikasi Antarbudaya sebagai Kunci Keberhasilan -----	78
5.3	Dialog Interaktif dengan Masyarakat: Metode dan Tantangan -----	79
5.4	Penggunaan Media Sosial dalam Sosialisasi Pembauran Kebangsaan-----	80

BAB 6 KONFLIK DAN RESOLUSI: MENJAGA HARMONI

SOSIAL ----- 83

6.1	Pemahaman Konflik Sosial Berbasis Ras, Suku, Agama, dan Budaya-----	84
6.2	Teori dan Pendekatan Resolusi Konflik -----	85
6.3	Studi Kasus Konflik dan Resolusi di Indonesia-----	87
6.4	Strategi Preventif dan Kuratif dalam Menjaga Harmoni Sosial-----	88

6.5	Literasi Damai dan Peran Teknologi Informasi-----	90
-----	---	----

BAB 7 PERAN DEWAN PEMBINA DALAM MENDUKUNG FPK----- 93

7.1	Struktur dan Tugas Dewan Pembina FPK -----	93
7.2	Kolaborasi Pemerintah dan Dewan Pembina -----	95
7.3	Best Practices: Peran Dewan Pembina di Daerah -----	96
7.4	Evaluasi Kinerja Dewan Pembina-----	98
7.5	Tantangan dan Rekomendasi -----	99

BAB 8 PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ----- 103

8.1	Mekanisme Pengawasan oleh Pemerintah Daerah-----	104
8.2	Evaluasi Efektivitas Program Pembauran Kebangsaan -----	105
8.3	Tata Cara Pelaporan: Praktik, Tantangan, dan Solusi-----	106
8.4	Penggunaan Teknologi dalam Pelaporan dan Evaluasi -----	107
8.5	Partisipasi Publik dalam Pengawasan (Subbab Tambahannya) -----	107

BAB 9 PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN ----- 109

9.1	Sumber Pendanaan Forum Pembauran Kebangsaan -----	110
9.2	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran -----	112
9.3	Strategi Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran-----	113
9.4	Studi Kasus Pengelolaan Anggaran yang Sukses -----	114
9.5	Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan Dana -----	116

BAB 10 MENATAP MASA DEPAN: PEMBAURAN	
KEBANGSAAN YANG BERKELANJUTAN-----	119
10.1 Tantangan Masa Depan dalam Pembauran Kebangsaan -----	120
10.2 Menguatkan Komitmen Nasional untuk Harmoni Kebangsaan -----	121
10.3 Peran Generasi Muda dalam Merawat Kebinekaan-----	122
10.4 Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Pembauran Kebangsaan-----	123
PENUTUP-----	127
LAMPIRAN -----	131
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006-----	131
TENTANG PENULIS-----	135



I. PENDAHULUAN

1.1 Mengenal Indonesia: Negara Bhineka Tunggal Ika

Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa dalam hal keberagaman. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah yang sangat luas, Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini bukan hanya sebuah fakta geografis, tetapi juga cerminan dari kekayaan sosial yang menjadi salah satu karakteristik utama bangsa Indonesia.

Bhineka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu," adalah semboyan yang mencerminkan semangat persatuan dalam perbedaan. Semboyan ini telah menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk terus berjalan bersama meskipun memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Keberagaman ini

tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga sumber kekuatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus memecah belah, tetapi justru bisa menjadi elemen penguat dalam membangun bangsa.

Keberagaman Budaya dan Etnis

Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat beragam. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Minangkabau, dan masih banyak lagi, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan cara hidup yang unik. Setiap suku memiliki cara sendiri untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan mereka, mulai dari seni, tarian, hingga cara berpakaian. Misalnya, masyarakat Bali terkenal dengan upacara agama Hindu yang megah, sementara masyarakat Toraja di Sulawesi dikenal dengan tradisi pemakaman yang rumit dan penuh simbolisme.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 1.340 suku bangsa mendiami Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan budaya yang berbeda [1]. Meskipun ada begitu banyak perbedaan, Indonesia memiliki satu kesamaan yang mendalam—semua suku bangsa ini hidup dalam satu bingkai negara yang disebut Indonesia. Di sinilah pentingnya prinsip Bhineka Tunggal Ika berperan, yaitu bahwa meskipun berbeda-beda, seluruh masyarakat Indonesia adalah satu kesatuan.

Keberagaman Agama

Keberagaman agama di Indonesia adalah salah satu aspek penting yang membentuk karakter bangsa. Indonesia

adalah negara dengan enam agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi jumlah penganut agama-agama lain juga signifikan.

Pernyataan Bhineka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, di mana berbagai perayaan agama, seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan Imlek, dirayakan bersama. Keberagaman agama di Indonesia menjadi landasan penting dalam kehidupan sosial yang penuh toleransi dan saling menghormati. Misalnya, di Bali, meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu, perayaan Hari Raya Idul Fitri tetap dirayakan dengan baik oleh masyarakat setempat yang mayoritas Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Namun, meskipun Indonesia secara umum berhasil menjaga toleransi antarumat beragama, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada ketegangan antaragama yang terjadi. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah kasus konflik sosial berbasis agama yang pernah terjadi di Ambon pada akhir 1990-an. Meski demikian, Indonesia berhasil bangkit dan memperkuat komitmennya untuk tetap hidup dalam kebhinekaan ini. Pemerintah terus mengupayakan dialog antaragama, serta memberikan ruang bagi masing-masing agama untuk berkembang secara damai [2].

Keberagaman Bahasa

Indonesia adalah negara dengan lebih dari 700 bahasa daerah, yang membuktikan betapa beragamnya bangsa ini dalam hal komunikasi. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai pemersatu. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh wilayah Indonesia, meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam lingkungan keluarga atau komunitas setempat.

Sebagai contoh, orang Jawa lebih sering menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di rumah, tetapi ketika berinteraksi dengan orang dari suku lain, mereka akan beralih ke bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan masyarakat Indonesia dalam menjaga bahasa daerah sembari memelihara bahasa nasional.

Keberagaman bahasa ini juga menggambarkan bagaimana Indonesia mampu mengelola pluralitas tanpa mengorbankan identitas budaya masing-masing daerah. Meskipun ada berbagai bahasa yang digunakan, Bahasa Indonesia tetap menjadi alat utama untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke [3].

Aspek	Jumlah	Prosentase dari Total Populasi	Keterangan
Suku Bangsa	1.340 suku bangsa	-	Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa.
Bahasa	700+ bahasa daerah	-	Lebih dari 700 bahasa daerah, dengan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Agama	6 agama resmi	87% Islam, 10% Kristen, 3% lainnya	Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, dengan Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan

Pentingnya Bhineka Tunggal Ika dalam Kehidupan Sosial

Makna dari Bhineka Tunggal Ika bukan hanya sekedar semboyan, tetapi sebuah filosofi hidup yang mendalam. Dalam setiap aspek kehidupan sosial, Bhineka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk mengakui dan menghargai perbedaan yang ada. Dalam konteks sosial, ini berarti menerima keragaman dalam berbagai bentuknya—baik itu suku, agama, ras, maupun budaya—sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman yang sangat luas, seluruh rakyatnya harus berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan persatuan. Keberagaman yang ada seharusnya tidak menjadi alasan untuk memecah belah, tetapi menjadi sumber kekuatan untuk maju bersama. Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga nilai-nilai ini, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Dari segi budaya, agama, bahasa, hingga etnis, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang memecah belah, melainkan sebuah kekuatan yang membentuk sebuah bangsa. Semangat Bhineka Tunggal Ika harus terus dijaga agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, damai, dan bersatu meskipun penuh dengan perbedaan. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus dirawat dan dipelihara untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Daftar Referensi:

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Suku Bangsa dan Bahasa di Indonesia*. Jakarta: BPS.
2. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
3. Lewis, M. P. (2009). *Ethnologue: Languages of the World*. Dallas: SIL International.

1.2 Mengapa Pembauran Kebangsaan Itu Penting

Pembauran kebangsaan adalah kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di Indonesia, sebuah negara yang sangat kaya akan keberagaman. Dengan lebih dari 1.300 suku, 700 bahasa, dan berbagai macam agama yang dianut, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan. Pembauran kebangsaan mengajak kita untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai penghalang. Dalam konteks inilah pembauran kebangsaan menjadi sangat penting, karena ia berfungsi untuk merawat dan memperkuat ikatan sosial antarwarga negara.

Menghindari Potensi Perpecahan

Keberagaman Indonesia bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, keberagaman adalah sumber kekayaan budaya, namun di sisi lain, tanpa adanya pembauran kebangsaan yang baik, keberagaman ini berpotensi memicu perpecahan. Dalam sejarah Indonesia, kita tidak bisa melupakan berbagai ketegangan yang muncul antara kelompok yang berbeda, baik itu berbasis agama, etnis, maupun budaya. Konflik yang terjadi di beberapa daerah, seperti Ambon pada akhir 1990-an, menunjukkan betapa rentannya keberagaman menjadi pemicu perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.

Pembauran kebangsaan bekerja untuk mengurangi risiko ini. Melalui proses ini, masyarakat di Indonesia diajarkan untuk saling memahami perbedaan dan menemukan kesamaan dalam kebhinekaan. Pembauran kebangsaan membantu

menghilangkan stereotip negatif antar kelompok dan membangun rasa saling percaya, yang pada gilirannya memperkokoh persatuan nasional. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan bahwa perbedaan yang ada bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi justru untuk memperkuat persatuan [1].

Meningkatkan Toleransi Antar-Agama dan Antar-Suku

Pembauran kebangsaan tidak hanya penting untuk menjaga persatuan, tetapi juga untuk menciptakan rasa saling menghargai antar kelompok. Indonesia dikenal dengan keragamannya yang mencakup berbagai agama dan suku bangsa. Dengan memiliki enam agama resmi yang diakui oleh negara—Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu—Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam hal menjaga toleransi antaragama.

Pembauran kebangsaan memberikan ruang bagi setiap agama dan suku untuk berinteraksi dan hidup berdampingan secara damai. Toleransi ini terlihat dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, misalnya, saling mengunjungi antar umat beragama saat merayakan hari besar agama masing-masing. Seperti saat umat Muslim merayakan Idul Fitri, umat Kristen merayakan Natal, atau umat Hindu merayakan Nyepi, perayaan tersebut seringkali dirayakan bersama dengan saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Proses pembauran kebangsaan membantu membangun rasa saling menghargai ini, yang sangat penting dalam menjaga kedamaian sosial.

Penting untuk dicatat bahwa pembauran kebangsaan bukan hanya soal toleransi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap perbedaan. Dengan adanya penghargaan ini, setiap kelompok tidak merasa terpinggirkan atau diabaikan. Sebaliknya, mereka merasa diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar. Ini penting karena ketika setiap individu merasa dihargai, mereka lebih cenderung untuk memberikan kontribusi positif bagi negara [2].

Membangun Identitas Nasional yang Kuat

Salah satu tujuan utama pembauran kebangsaan adalah membangun identitas nasional yang kuat. Meskipun Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan agama yang berbeda, pembauran kebangsaan membantu menciptakan sebuah identitas bersama, yaitu identitas sebagai bangsa Indonesia. Ini sangat penting dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang datang, terutama dalam menjaga persatuan di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat.

Identitas nasional yang kuat juga berperan dalam meningkatkan rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Ketika setiap individu merasa memiliki tanah air yang sama, mereka lebih bersemangat untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Pembauran kebangsaan memastikan bahwa meskipun kita berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu dalam tujuan dan cita-cita yang lebih besar sebagai bangsa Indonesia. Tanpa pembauran kebangsaan, identitas nasional kita akan terpecah-pecah dan lemah. Oleh karena itu, membangun identitas nasional yang inklusif sangat bergantung pada bagaimana proses pembauran kebangsaan dijalankan secara efektif [3].

Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi

Pembauran kebangsaan juga berdampak langsung pada pemberdayaan sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat Indonesia hidup dalam keadaan damai dan saling menghargai, mereka lebih mudah untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Negara yang stabil dan harmonis memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berkembang, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, atau budaya.

Dengan adanya pembauran kebangsaan, kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, pendidikan, dan pekerjaan. Ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian nasional. Semakin inklusif sebuah masyarakat, semakin besar pula kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Pembauran kebangsaan membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan setara, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan bersama [4].

Kesimpulan

Pembauran kebangsaan adalah hal yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan membangun negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Melalui pembauran kebangsaan, kita dapat menciptakan rasa saling menghargai antar kelompok, membangun identitas nasional yang kuat, serta mendorong

pemberdayaan sosial dan ekonomi yang merata. Dalam negara yang sangat beragam ini, pembauran kebangsaan adalah jalan yang harus terus dijaga agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Keberhasilan pembauran kebangsaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Daftar Referensi:

1. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
2. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
3. Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.
4. Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

1.3 Apa Itu Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk mengembangkan komunikasi dan interaksi antarwarga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, agama, budaya, dan sosial. FPK bertujuan untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat toleransi, serta menciptakan masyarakat yang hidup berdampingan dengan saling menghormati. Forum ini sangat relevan dengan tujuan untuk mengelola keberagaman Indonesia yang sangat besar dan sekaligus untuk

mengatasi potensi perpecahan yang bisa muncul akibat perbedaan-perbedaan tersebut.

Dasar Pembentukan FPK

FPK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut, FPK dijelaskan sebagai platform yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memelihara stabilitas sosial dan membangun kesadaran kebangsaan yang inklusif. Dengan kata lain, FPK bukan hanya sebuah forum diskusi, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk menciptakan suasana kondusif dalam kerangka keberagaman Indonesia.

Melalui FPK, masyarakat diajak untuk memperluas wawasan tentang pentingnya hidup dalam harmoni, serta untuk meningkatkan pemahaman antar kelompok yang berbeda. Forum ini menjadi ruang di mana ide-ide dan pandangan yang beragam bisa dikomunikasikan, serta menjadi tempat bagi masyarakat untuk belajar mengenai pentingnya rasa saling menghargai dalam hidup bermasyarakat.

Tujuan Forum Pembauran Kebangsaan

FPK memiliki beberapa tujuan utama yang sejalan dengan prinsip pembauran kebangsaan, di antaranya:

1. Meningkatkan Toleransi Sosial

Forum ini menjadi tempat untuk mendiskusikan dan mempromosikan nilai-nilai toleransi antar agama, suku, dan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat diajak untuk saling memahami dan menerima perbedaan sebagai

bagian dari kekayaan bangsa. Dalam konteks ini, FPK berperan penting untuk mencegah ketegangan sosial yang bisa timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman antar kelompok.

2. Memperkuat Identitas Nasional

FPK tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berdialog, tetapi juga sebagai ruang untuk memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas nasional Indonesia. Indonesia yang kaya akan budaya, bahasa, dan agama perlu memiliki fondasi kuat dalam identitas nasional yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. FPK mengajak masyarakat untuk melihat keberagaman ini sebagai aset bangsa yang harus dijaga bersama.

3. Mencegah Konflik Sosial

Salah satu peran krusial FPK adalah mencegah konflik yang berbasis pada perbedaan, seperti yang terjadi di masa lalu di beberapa daerah Indonesia. Pembauran kebangsaan yang dipromosikan oleh FPK berupaya menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif dan penyelesaian masalah secara damai. Misalnya, melalui program-program yang mendorong masyarakat untuk lebih memahami potensi konflik yang ada dan menemukan solusi berbasis konsensus.

4. Mengembangkan Pendidikan Kebangsaan

FPK juga berfungsi untuk memberikan pendidikan kebangsaan kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dalam era globalisasi ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran tinggi mengenai pentingnya kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Melalui diskusi, seminar, pelatihan, dan kegiatan lain yang digelar dalam FPK, masyarakat dapat terus belajar mengenai esensi pentingnya hidup dalam keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk.

Kegiatan dan Implementasi FPK

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Forum Pembauran Kebangsaan meliputi berbagai program yang bertujuan untuk memfasilitasi interaksi sosial antara masyarakat dari berbagai latar belakang. Program-program ini antara lain meliputi pelatihan kepemimpinan, diskusi tentang keberagaman, seminar tentang toleransi, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat lintas etnis dan agama.

Penting untuk dicatat bahwa FPK tidak hanya berfokus pada aspek teoretis, tetapi juga pada implementasi nyata di lapangan. Salah satunya adalah kegiatan berbasis masyarakat yang melibatkan berbagai pihak, baik itu masyarakat sipil, pemerintah, maupun organisasi-organisasi keagamaan. Dengan adanya berbagai kegiatan ini, FPK dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berdaya saing.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam FPK

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memfasilitasi terbentuknya dan berjalannya Forum Pembauran Kebangsaan. Melalui kebijakan yang mendukung, seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, pemerintah memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan FPK. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, juga berperan

penting dalam memastikan bahwa FPK dapat berjalan dengan baik di setiap tingkat pemerintahan.

Namun, keberhasilan FPK tidak hanya tergantung pada pemerintah. Masyarakat juga harus aktif terlibat dalam forum ini. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, tujuan FPK tidak akan tercapai dengan maksimal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa mereka adalah bagian dari proses ini dan turut serta dalam upaya memajukan pembauran kebangsaan di Indonesia.

Kesimpulan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah sebuah wadah yang sangat penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia, mengingat keberagaman yang ada. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan toleransi, memperkuat identitas nasional, serta mencegah konflik sosial, FPK menjadi alat yang sangat efektif dalam menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah, FPK mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni meski berbeda-beda. Oleh karena itu, FPK harus didorong untuk terus berkembang dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar tujuan dari pembauran kebangsaan dapat tercapai secara maksimal.

Daftar Referensi:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
2. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
3. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.



2. PEMBAURAN KEBANGSAAN: KONSEP TEORI DAN PRAKTEK

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat besar, memiliki tantangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan tersebut. Pembauran kebangsaan bukan hanya menjadi tujuan negara, tetapi juga sebuah konsep yang perlu dipahami dengan baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembauran kebangsaan, diharapkan masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dengan saling menghargai, tanpa mengurangi keberagaman yang ada.

Pembauran kebangsaan lebih dari sekadar proses toleransi; ini adalah cara untuk menciptakan kohesi sosial yang

berkelanjutan, di mana perbedaan bukan menjadi sumber konflik, melainkan sumber kekuatan. Untuk itu, memahami konsep dasar dari pembauran kebangsaan menjadi langkah pertama yang penting. Konsep ini tidak hanya relevan bagi pemerintah, tetapi juga bagi setiap individu dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, pembauran kebangsaan dapat dijalankan dengan lebih efektif, membangun hubungan yang lebih harmonis antarwarga negara.

2.1 Definisi dan Konsep Dasar Pembauran Kebangsaan

Pembauran kebangsaan adalah suatu proses sosial yang mencakup usaha untuk menyatukan beragam elemen masyarakat ke dalam satu identitas nasional, di mana perbedaan yang ada dihargai dan diterima sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Istilah ini merujuk pada bagaimana kelompok-kelompok sosial yang berbeda, baik berdasarkan suku, agama, bahasa, maupun budaya, dapat saling berinteraksi dan hidup berdampingan dalam kesatuan negara tanpa terjadinya perpecahan.

Secara umum, pembauran kebangsaan berfokus pada integrasi sosial yang inklusif, yang tidak hanya melibatkan perbedaan etnis atau agama, tetapi juga aspek lain seperti status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Menurut Suryadinata (2003), pembauran kebangsaan tidak hanya berarti menggabungkan elemen-elemen sosial yang berbeda, tetapi juga menciptakan rasa memiliki yang sama terhadap negara, dengan memperkuat identitas nasional yang dibangun

berdasarkan semangat kebersamaan dan penghargaan terhadap perbedaan [1].

Pada tingkat teori, pembauran kebangsaan sering dikaitkan dengan teori integrasi sosial yang dikembangkan oleh para ilmuwan sosial seperti Émile Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat yang beragam, solidaritas sosial dapat tercipta melalui nilai-nilai bersama yang dipegang oleh seluruh warga negara. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut sering kali dirujuk pada Pancasila, yang menjadi dasar ideologi negara. Pancasila mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam, kita tetap bisa bersatu melalui kesepakatan mengenai prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara [2].

Dalam praktiknya, pembauran kebangsaan membutuhkan adanya komunikasi yang terbuka antar berbagai kelompok, serta pengakuan atas hak-hak setiap kelompok untuk menjaga identitas dan budaya mereka. Proses ini juga melibatkan pembentukan institusi sosial yang mendukung hubungan antar kelompok yang berbeda. Salah satu contoh nyata dari pembauran kebangsaan di Indonesia adalah melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan interaksi sosial yang inklusif antara berbagai kelompok masyarakat [3].

Sebagai konsep dasar, pembauran kebangsaan juga memerlukan perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap keberagaman. Tidak hanya dalam konteks teori, pembauran kebangsaan harus juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memahami bahwa

keberagaman adalah sebuah aset yang memperkaya bangsa, akan lebih mudah menerima dan mendukung proses integrasi sosial ini. Pembauran kebangsaan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan waktu dan usaha bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun berbagai elemen sosial lainnya.

Kesimpulan

Definisi dan konsep dasar pembauran kebangsaan mencakup usaha untuk menciptakan keharmonisan sosial di tengah keberagaman. Pembauran kebangsaan adalah proses yang mengarah pada pembentukan solidaritas sosial melalui penghargaan terhadap perbedaan, yang pada akhirnya memperkuat persatuan nasional. Melalui teori dan praktik yang dijelaskan di atas, pembauran kebangsaan menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat terus berkembang sebagai bangsa yang kuat dalam keberagaman.

Daftar Referensi:

1. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
2. Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan.
3. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.

2.2 Teori-Teori Integrasi Sosial dan Kebangsaan

Integrasi sosial dan kebangsaan adalah konsep yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan berbagai teori yang berkembang seiring dengan pemahaman kita tentang masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, dengan keragamannya yang luar biasa, memahami teori-teori integrasi sosial sangat penting untuk mewujudkan pembauran kebangsaan yang efektif. Integrasi sosial berhubungan erat dengan pembentukan identitas bersama dalam sebuah negara, di mana setiap individu, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, merasa menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar.

Berbagai teori integrasi sosial telah dikemukakan oleh para ilmuwan sosial, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda dalam melihat bagaimana kelompok-kelompok sosial yang beragam dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa teori utama yang relevan dengan konteks pembauran kebangsaan di Indonesia. Teori-teori ini memberikan landasan intelektual bagi pengelolaan keberagaman dan penerapan pembauran kebangsaan secara praktis.

1. Teori Asimilasi: Integrasi Melalui Penyerapan

Teori asimilasi adalah salah satu teori pertama yang berkembang dalam studi integrasi sosial. Teori ini mengusulkan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda harus "menyatu" menjadi satu identitas tunggal, dengan budaya dominan menyerap budaya kelompok minoritas. Salah satu

tokoh yang paling dikenal dalam teori ini adalah Robert E. Park, yang mengemukakan bahwa proses asimilasi terjadi dalam beberapa tahap: dari kontak, persaingan, akomodasi, hingga akhirnya asimilasi. Dalam pandangan ini, keberagaman budaya, bahasa, dan agama diharapkan akan hilang atau menyatu dalam satu budaya nasional.

Di Indonesia, teori asimilasi sempat diterapkan pada masa-masa awal kemerdekaan, dengan harapan bahwa kelompok-kelompok etnis yang berbeda akan menyatu dalam satu budaya nasional Indonesia. Namun, konsep asimilasi ini mendapat kritik karena cenderung mengabaikan keberagaman yang ada dan menekankan dominasi budaya mayoritas. Pembauran kebangsaan yang lebih inklusif, di mana setiap kelompok dihargai dan diterima, menjadi alternatif yang lebih tepat dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk [1].

2. Teori Pluralisme: Menghargai Keberagaman Tanpa Harus Menyatu

Sebaliknya, teori pluralisme menyarankan bahwa masyarakat harus mengakui dan merayakan perbedaan, bukan menghapusnya. Dalam teori ini, setiap kelompok etnis, agama, dan budaya dapat mempertahankan identitas mereka sendiri sambil tetap menjadi bagian dari masyarakat yang lebih besar. Teori pluralisme dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Horace Kallen dan John Dewey, yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan sebagai kekuatan dalam kehidupan sosial.

Menurut teori pluralisme, integrasi sosial tercapai bukan dengan cara menyatukan semua perbedaan menjadi satu identitas, tetapi dengan menciptakan ruang di mana setiap kelompok bisa berkembang sesuai dengan identitas mereka masing-masing, tanpa terancam atau terpinggirkan. Dalam konteks Indonesia, pluralisme lebih selaras dengan semangat Bhineka Tunggal Ika—berbeda-beda tetapi tetap satu. Pembauran kebangsaan yang dimaksud dalam teori pluralisme adalah penghargaan terhadap keragaman, yang memungkinkan setiap kelompok untuk berkembang tanpa kehilangan rasa kebangsaannya [2].

3. Teori Integrasi Sosial Durkheim: Solidaritas melalui Nilai Bersama

Émile Durkheim, seorang pemikir utama dalam sosiologi, mengembangkan teori integrasi sosial yang menekankan pentingnya solidaritas dalam masyarakat. Durkheim membedakan dua jenis solidaritas: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat yang homogen, di mana norma dan nilai-nilai bersama mengikat anggota masyarakat. Sementara solidaritas organik terjadi dalam masyarakat yang heterogen, di mana perbedaan peran dan fungsi sosial menjadi dasar bagi keterikatan sosial.

Dalam konteks Indonesia, solidaritas organik lebih relevan, karena Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk. Durkheim berargumen bahwa meskipun masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dengan nilai dan norma yang berbeda, mereka tetap bisa terintegrasi melalui

pembagian kerja yang saling bergantung satu sama lain. Pembauran kebangsaan di Indonesia dapat dicapai dengan cara membangun solidaritas sosial berdasarkan fungsi dan kontribusi setiap kelompok terhadap negara. Setiap kelompok, meskipun berbeda, tetap saling membutuhkan untuk kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi negara.

Solidaritas ini juga tercermin dalam ideologi Pancasila, yang mempromosikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebersamaan sebagai dasar integrasi sosial dalam keberagaman [3].

4. Teori Multikulturalisme: Mengakui dan Merayakan Keberagaman

Teori multikulturalisme berargumen bahwa keberagaman harus diakui dan dihormati sebagai bagian dari identitas nasional. Berbeda dengan teori pluralisme, yang menekankan integrasi dalam keragaman, multikulturalisme mengusulkan agar setiap kelompok tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dirayakan secara aktif dalam masyarakat. Dalam teori ini, negara tidak hanya menjamin hak-hak individu, tetapi juga hak kelompok untuk mempertahankan budaya, bahasa, dan tradisi mereka.

Dalam praktiknya, multikulturalisme di Indonesia dapat dilihat dalam kebijakan afirmatif yang memberikan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya mereka. Pemberdayaan kelompok-kelompok ini melalui pendidikan, media, dan kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang

mendukung teori ini. Teori multikulturalisme juga mempromosikan inklusi sosial yang lebih besar, di mana semua kelompok diberikan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik negara.

Namun, penerapan multikulturalisme di Indonesia perlu diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, agar keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan [4].

Kesimpulan

Teori-teori integrasi sosial dan kebangsaan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat yang beragam dapat hidup bersama secara harmonis. Setiap teori, mulai dari asimilasi hingga multikulturalisme, memiliki relevansi dan tantangan tersendiri dalam konteks Indonesia. Dalam praktiknya, teori pluralisme dan solidaritas organik yang dikemukakan oleh Durkheim lebih mencerminkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pembauran kebangsaan bukan hanya soal menyatukan perbedaan, tetapi juga mengelola keberagaman dengan cara yang menghargai identitas masing-masing kelompok, sambil tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Daftar Referensi:

1. Park, R. E. (1950). *Race and Culture*. Glencoe, IL: Free Press.
2. Kallen, H. (1930). *Culture and Democracy in the United States*. New York: Boni and Liveright.

3. Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan.
4. Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*. Princeton University Press.

2.3 Menjaga Identitas Budaya dalam Integrasi Nasional

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman budaya, memiliki tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai identitas budaya ke dalam satu kesatuan bangsa yang utuh. Di satu sisi, kita ingin agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam satu identitas nasional, tetapi di sisi lain, kita juga harus menjaga dan merayakan kekayaan budaya yang ada. Pembauran kebangsaan tidak berarti menghapus atau menyamakan identitas budaya, tetapi lebih kepada mengelola keberagaman dengan cara yang menghargai setiap budaya, sambil tetap memperkuat kesatuan bangsa.

Proses menjaga identitas budaya dalam integrasi nasional merupakan salah satu aspek penting dalam pembauran kebangsaan yang sukses. Identitas budaya bukan hanya soal kesenian, adat istiadat, atau bahasa, tetapi juga tentang cara pandang, nilai-nilai, dan tradisi yang membentuk karakter suatu kelompok. Ketika identitas budaya ini dijaga dan dihargai, maka rasa kebanggaan terhadap kebangsaan dapat semakin menguat.

Pentingnya Identitas Budaya dalam Pembauran Kebangsaan

Identitas budaya adalah ciri khas yang membedakan suatu kelompok atau bangsa dari kelompok lainnya. Dalam konteks Indonesia, identitas budaya mencakup beragam unsur, mulai dari bahasa, seni, agama, hingga cara hidup. Identitas budaya ini bukan hanya penting sebagai alat pengenalan, tetapi juga menjadi dasar bagi setiap individu untuk merasa diterima dan dihargai dalam masyarakat.

Di Indonesia, keberagaman budaya sering kali dilihat sebagai aset, bukan sebagai hambatan. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dunia tentang bagaimana keragaman bisa dikelola dengan baik dalam bingkai persatuan. Keberagaman ini harus dijaga dalam proses integrasi sosial, karena identitas budaya yang dipertahankan akan menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan memperkaya satu sama lain.

Teori tentang Penghargaan terhadap Identitas Budaya

Teori multikulturalisme merupakan salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini. Multikulturalisme mengakui bahwa setiap budaya memiliki nilai yang setara dan penting. Dalam bukunya, Charles Taylor mengemukakan bahwa negara harus memberikan ruang bagi setiap individu dan kelompok untuk mengungkapkan dan merayakan identitas budaya mereka tanpa rasa takut atau diskriminasi [1]. Oleh karena itu, dalam konteks pembauran kebangsaan, kita harus menciptakan ruang bagi budaya lokal untuk berkembang

di samping budaya nasional. Hal ini akan memperkuat rasa saling menghargai antar kelompok dan menjaga keberagaman yang ada.

Namun, dalam praktiknya, menjaga identitas budaya dalam integrasi nasional membutuhkan kebijakan yang bijaksana. Negara harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan kelompok mayoritas, tetapi juga memberikan ruang bagi kelompok minoritas untuk melestarikan budaya mereka. Ini bisa melalui pendidikan, pelestarian seni tradisional, serta kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa daerah.

Mengelola Keberagaman dan Menjaga Keseimbangan

Meskipun penting untuk menjaga identitas budaya, kita juga perlu menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan pembentukan identitas nasional yang menyatukan. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengajarkan bahwa kita bisa hidup dalam perbedaan dengan tetap mengutamakan persatuan. Hal ini terlihat dalam sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", yang menekankan pentingnya menyatukan perbedaan untuk tujuan bersama. Pembauran kebangsaan yang berhasil akan mengedepankan semangat ini, dengan tetap mengakui bahwa identitas budaya yang berbeda-beda merupakan kekuatan yang memperkaya bangsa.

Di sisi lain, penting juga untuk menyadari bahwa globalisasi membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya lokal. Pengaruh budaya asing yang semakin kuat dapat

mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, negara dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menjaga agar budaya lokal tidak tergerus oleh arus globalisasi, namun tetap dapat berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

Strategi Praktis untuk Menjaga Identitas Budaya

Ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk menjaga identitas budaya dalam proses pembauran kebangsaan:

- **Pendidikan Multikultural**

Pendidikan adalah kunci untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga identitas budaya. Program pendidikan multikultural di sekolah-sekolah dan universitas dapat memperkenalkan siswa pada keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, generasi muda akan lebih menghargai perbedaan dan merasa bangga dengan budaya mereka sendiri, sekaligus menyadari kekayaan budaya bangsa secara keseluruhan.

- **Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional**

Seni dan budaya tradisional, seperti musik, tari, dan kerajinan tangan, harus didorong untuk berkembang. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas untuk pelestarian seni tradisional, seperti festival budaya dan kompetisi seni daerah. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk melibatkan diri dalam pelestarian budaya melalui kegiatan komunitas.

- Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Keberagaman Budaya
Kebijakan pemerintah sangat menentukan dalam pelestarian identitas budaya. Melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis pada keberagaman, negara dapat menciptakan ruang bagi setiap budaya untuk berkembang. Misalnya, penggunaan bahasa daerah dalam sistem pendidikan atau media massa dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga agar bahasa-bahasa daerah tidak punah.
- Dialog Antarbudaya
Forum dan kegiatan yang memfasilitasi dialog antarbudaya akan memperkuat saling pengertian antar kelompok. Hal ini penting agar kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling berbagi pengalaman dan mempelajari nilai-nilai dari budaya lain tanpa kehilangan jati diri mereka.

Kesimpulan

Menjaga identitas budaya dalam integrasi nasional bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Pembauran kebangsaan harus dilaksanakan dengan cara yang menghargai keberagaman budaya, serta memberikan ruang bagi setiap kelompok untuk menjaga dan mengembangkan budaya mereka. Dengan pendekatan yang bijak dan kebijakan yang mendukung, Indonesia dapat menjaga kekayaan budaya yang ada sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Identitas budaya yang terpelihara dengan baik akan menjadi landasan yang kokoh bagi integrasi sosial yang harmonis dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Daftar Referensi:

1. Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*. Princeton University Press.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan.

2.4 Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menciptakan dan memperkuat integrasi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Pembauran ini bukan sekadar upaya untuk "menyatukan" perbedaan, tetapi untuk menciptakan keharmonisan dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda, dengan tetap menghargai identitas masing-masing. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan ini sangat penting, karena prinsip-prinsip tersebut akan menjadi pedoman dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan yang dapat memperkuat integrasi sosial.

1. Prinsip Inklusivitas: Menerima Semua Kelompok Tanpa Diskriminasi

Salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam pembauran kebangsaan adalah inklusivitas, yaitu prinsip yang

mengedepankan penerimaan terhadap semua kelompok tanpa diskriminasi. Setiap individu, kelompok, atau komunitas yang ada di Indonesia harus merasa diterima dan dihargai, tanpa memandang suku, agama, atau asal-usul mereka. Proses pembauran kebangsaan harus melibatkan semua kelompok dalam masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas. Inklusivitas juga berarti memberi kesempatan yang sama bagi setiap kelompok untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), setiap kelompok memiliki ruang untuk berbicara dan didengar, tanpa ada yang terpinggirkan. Hal ini mengarah pada terbentuknya masyarakat yang adil, di mana setiap orang dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara yang setara. Dengan mengedepankan inklusivitas, pembauran kebangsaan menjadi lebih mudah dilaksanakan karena semua pihak merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses integrasi [1].

2. Prinsip Toleransi dan Penghargaan Terhadap Perbedaan

Toleransi adalah prinsip yang mendasar dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan. Toleransi bukan hanya tentang membiarkan orang lain berbeda, tetapi juga tentang saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, toleransi menjadi kunci untuk mencegah konflik dan menjaga stabilitas sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mengajarkan bahwa perbedaan harus disikapi dengan saling menghormati.

Prinsip toleransi ini sangat penting dalam menjaga keberagaman di Indonesia, baik di tingkat individu maupun kelompok. Dengan meningkatkan toleransi, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perbedaan dan mengurangi potensi konflik. Implementasi toleransi dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghormati perayaan agama yang berbeda, saling menghargai adat istiadat, dan mengakui hak-hak kelompok minoritas, sangat diperlukan dalam proses pembauran kebangsaan. Toleransi adalah dasar dari hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia [2].

3. Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Sosial

Kesetaraan dan keadilan sosial adalah prinsip-prinsip dasar lainnya yang sangat penting dalam pembauran kebangsaan. Dalam masyarakat yang plural, kesetaraan tidak hanya mencakup kesempatan yang sama di bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang politik, pendidikan, dan akses terhadap layanan sosial. Setiap kelompok, baik itu mayoritas maupun minoritas, harus merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan.

Keadilan sosial juga berarti bahwa negara hadir untuk memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak ada satu kelompok pun yang merasa tertinggal atau dipinggirkan. Misalnya, dalam pendidikan dan kesempatan kerja, kebijakan afirmatif yang memberi peluang kepada kelompok yang kurang terwakili untuk berkembang dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan.

Negara harus memastikan bahwa keberagaman tidak menjadi penghalang bagi setiap individu untuk mengakses hak-hak dasar mereka sebagai warga negara [3].

4. Prinsip Dialog dan Kerjasama Lintas Kelompok

Dialog adalah prinsip yang penting dalam pembauran kebangsaan. Pembauran kebangsaan tidak bisa tercapai jika tidak ada komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok masyarakat. Melalui dialog, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling berbagi perspektif, memahami pandangan satu sama lain, dan mencari solusi bersama untuk masalah yang ada. Dialog juga membuka peluang untuk membangun kepercayaan antar kelompok yang seringkali terkendala oleh prasangka atau stereotip.

Kerjasama antar kelompok juga sangat penting. Melalui kerjasama, berbagai kelompok dalam masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, seperti pembangunan sosial, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, melalui FPK, berbagai kelompok agama, suku, dan budaya dapat bekerjasama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Kerjasama ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa saling memiliki di antara warga negara [4].

5. Prinsip Pendidikan Kebangsaan yang Berkelanjutan

Pendidikan kebangsaan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan. Untuk memastikan bahwa integrasi sosial dapat berlangsung dengan

baik, penting bagi generasi muda untuk diberikan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan ini dapat diterapkan dalam kurikulum sekolah, program pelatihan bagi aparatur negara, dan dalam kegiatan masyarakat.

Pendidikan kebangsaan yang berkelanjutan akan membentuk generasi yang lebih peka terhadap pentingnya keberagaman dan lebih siap untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial yang harmonis. Ini juga mencakup pengajaran tentang sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendidikan yang baik, masyarakat dapat memahami bahwa integrasi sosial bukanlah proses yang mudah, tetapi adalah hasil dari usaha bersama yang harus terus dijaga dan diteruskan [5].

Kesimpulan

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan inklusivitas, toleransi, kesetaraan, dialog, dan pendidikan kebangsaan yang berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, di mana keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bangsa. Pembauran kebangsaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang harus aktif berpartisipasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersatu dalam perbedaan.

Daftar Referensi:

1. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*. Princeton University Press.
4. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
5. Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan.



3. PERAN STRATEGIS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)

3.1 Fungsi dan Tugas FPK di Berbagai Tingkatan Pemerintahan

FPK memainkan peran yang sangat penting dalam setiap tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan/desa. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran yang berbeda dalam mendukung tercapainya tujuan pembauran kebangsaan, namun FPK sebagai forum untuk komunikasi dan interaksi antar kelompok masyarakat tetap menjadi unsur penting dalam menjaga keharmonisan sosial.

1. FPK di Tingkat Pusat, Sebuah Harapan

Saat buku ini ditulis, belum ada kelembagaan FPK di tingkat pusat. Padahal, kelembagaan FPK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tentu membutuhkan induk di tingkat pusat. Wacana pembentukan FPK di tingkat pusat terus disuarakan oleh FPK di berbagai provinsi dan kabupaten kota.

Namun meski begitu, dalam buku ini, fungsi dan tugas FPK di tingkat pusat sengaja dihadirkan. Selain sebagai ekspresi dari harapan, juga sedikit banyak bisa dijadikan salah satu referensi.

Di tingkat pusat, FPK seyogyanya berfungsi sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan nasional mengenai integrasi sosial dan pembauran kebangsaan. FPK di tingkat pusat memiliki tugas untuk menyusun pedoman, memberikan pengarahan, serta memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Melalui forum ini, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa dapat dipadukan dalam satu kebijakan yang komprehensif dan dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

FPK di tingkat pusat juga bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai lembaga yang terlibat dalam isu-isu sosial, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka menciptakan sinergi antar instansi yang terkait. Melalui koordinasi ini, FPK memastikan bahwa semua kebijakan yang

dijalankan di seluruh wilayah Indonesia selaras dengan prinsip dasar pembauran kebangsaan dan pengelolaan keberagaman secara adil dan merata.

2. FPK di Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi, FPK berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pusat dengan pelaksanaannya di daerah. FPK provinsi bertugas untuk memastikan bahwa program-program yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dapat diterapkan secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Setiap provinsi di Indonesia memiliki dinamika sosial dan budaya yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan pembauran kebangsaan harus disesuaikan dengan konteks lokal.

FPK di tingkat provinsi juga bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antarwarga negara yang berbeda latar belakang. Selain itu, FPK provinsi juga berfungsi untuk mendeteksi dan menangani potensi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan agama, suku, atau budaya, serta memberikan solusi melalui dialog dan mediasi. Dalam hal ini, FPK provinsi harus memiliki jaringan yang kuat dengan lembaga sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat agar bisa lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

3. FPK di Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota, FPK berperan sebagai pelaksana langsung dari program-program pembauran kebangsaan yang telah disusun di tingkat provinsi dan pusat.

Pada tingkat ini, FPK berfungsi untuk menyosialisasikan dan mengimplementasikan kebijakan pembauran kebangsaan dengan lebih terperinci. Salah satu tugas utama FPK di tingkat kabupaten/kota adalah untuk mendorong terciptanya komunikasi antarwarga yang memiliki latar belakang berbeda, serta untuk menangani masalah yang bersifat lokal namun berpotensi menjadi sumber konflik.

FPK kabupaten/kota juga berperan dalam memperkuat jalinan kerjasama antar kelompok sosial, agama, dan budaya. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan kegiatan sosial yang mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Melalui kegiatan ini, FPK kabupaten/kota dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan, sekaligus memperkuat solidaritas antarwarga negara di tingkat lokal. Selain itu, FPK kabupaten/kota juga bertugas untuk memberikan ruang bagi kelompok minoritas agar bisa menyuarakan hak-haknya dalam konteks integrasi sosial yang lebih luas.

4. FPK di Tingkat Kecamatan/Desa

FPK di tingkat kecamatan/desa memainkan peran yang sangat mendasar dalam memperkuat integrasi sosial di tingkat akar rumput. Berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, FPK di tingkat kecamatan/desa memiliki tugas untuk melaksanakan pembauran kebangsaan secara langsung di masyarakat. Pada tingkat ini, FPK bertanggung jawab untuk mendorong terciptanya dialog sosial yang sehat dan mendalam

antarwarga yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku bangsa.

Salah satu peran penting FPK di tingkat kecamatan/desa adalah untuk memfasilitasi kegiatan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kerukunan sosial. Di tingkat ini, masyarakat lebih terlibat langsung dalam kegiatan yang berbasis pada kebersamaan, seperti gotong-royong, pelatihan keterampilan bersama, atau kegiatan sosial lainnya. FPK juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan potensi konflik yang dapat muncul akibat perbedaan antar kelompok, dengan menggunakan pendekatan dialog dan mediasi yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

Melalui FPK di tingkat kecamatan/desa, pemerintah dapat memastikan bahwa prinsip pembauran kebangsaan diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Forum ini juga memungkinkan masyarakat di tingkat desa untuk lebih berperan aktif dalam memperjuangkan keharmonisan sosial, serta memupuk rasa persatuan dalam keragaman yang ada di tingkat lokal. Kegiatan yang diselenggarakan oleh FPK di tingkat kecamatan/desa berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan yang inklusif dan menghargai keberagaman.

Peran Sinergis FPK di Berbagai Tingkatan

Peran FPK di setiap tingkatan pemerintahan saling terkait dan saling mendukung. Sinergi antara FPK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/desa sangat

penting untuk menciptakan pembauran kebangsaan yang berjalan secara efektif. FPK pusat memberikan arahan dan kebijakan umum, sedangkan FPK provinsi dan kabupaten/kota bertugas untuk menerjemahkan kebijakan tersebut dalam konteks lokal, dengan memperhatikan dinamika sosial dan budaya setempat. Di tingkat kecamatan/desa, FPK berperan langsung dalam implementasi kegiatan yang mendalam dan berbasis pada keberagaman masyarakat di level akar rumput.

Kolaborasi yang baik antara ketiga tingkat pemerintahan ini akan menghasilkan program pembauran kebangsaan yang lebih tepat sasaran, adil, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara FPK di setiap tingkat pemerintahan sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Kesimpulan

FPK memiliki peran strategis dalam menyukseskan pembauran kebangsaan di Indonesia. Dengan melibatkan semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota, serta kecamatan/desa, FPK mampu menjalankan fungsinya untuk menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kerja sama yang baik antar berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, pembauran kebangsaan dapat berjalan dengan efektif, mencegah konflik sosial, dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Implementasi yang tepat dari FPK akan menciptakan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global.

Daftar Referensi:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

3.2 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Forum Pembauran Kebangsaan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga integrasi sosial dan memperkuat kerukunan antar kelompok masyarakat yang beragam. Agar dapat menjalankan perannya dengan efektif, FPK membutuhkan struktur organisasi yang jelas dan mekanisme kerja yang sistematis. Dengan adanya struktur yang terorganisasi dengan baik, FPK dapat melaksanakan program-programnya secara optimal, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. Dalam subbab ini, kita akan membahas secara mendalam tentang struktur organisasi FPK, serta mekanisme kerja yang mendukung tercapainya tujuan pembauran kebangsaan.

1. Struktur Organisasi FPK

Struktur organisasi FPK di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa tingkatan, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab yang

berbeda, namun saling terkait dan mendukung satu sama lain. Menurut Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, FPK terdiri dari dua struktur utama, yaitu struktur organisasi di tingkat pusat dan struktur organisasi di tingkat daerah. Struktur ini harus bisa memastikan kelancaran komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, dari tingkat pusat hingga tingkat lokal.

FPK Pusat

Di tingkat pusat, FPK dipimpin oleh sebuah badan koordinasi yang terdiri dari perwakilan kementerian terkait, lembaga negara, serta tokoh masyarakat. Badan koordinasi ini bertugas untuk merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan integrasi sosial, pembauran kebangsaan, serta mengarahkan pelaksanaan program-program pembauran kebangsaan di seluruh Indonesia. Di sini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan sebagai lembaga pengarah utama yang memastikan keselarasan kebijakan FPK dengan tujuan nasional dalam menjaga persatuan Indonesia.

Selain itu, FPK pusat juga melibatkan berbagai lembaga lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. Setiap kementerian atau lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan program yang sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Misalnya, Kementerian Pendidikan berfokus pada pengembangan kurikulum pendidikan multikultural, sementara Kementerian Sosial berperan dalam program pemberdayaan sosial yang inklusif.

FPK Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan/Desa)

Di tingkat daerah, FPK dibentuk dengan struktur yang lebih sederhana namun tetap terkoordinasi dengan baik. Di tingkat provinsi, FPK diharapkan bisa mengkoordinasikan program-program pembauran kebangsaan di seluruh kabupaten/kota dalam wilayahnya. FPK provinsi bertugas untuk menerjemahkan kebijakan yang dibuat di tingkat pusat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Begitu juga di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan/desa, FPK bertugas untuk menjalankan program-program yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pada tingkat ini, struktur organisasi FPK lebih bersifat praktis, dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen-elemen sosial lainnya. FPK di tingkat daerah lebih fokus pada implementasi kegiatan-kegiatan yang langsung melibatkan masyarakat, seperti pelatihan, seminar, dialog sosial, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar kelompok yang berbeda.

2. Mekanisme Kerja FPK

Mekanisme kerja FPK berfokus pada koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program-program pembauran kebangsaan. Proses ini dimulai dengan perencanaan kebijakan, diikuti dengan pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah, serta evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dari kebijakan yang diambil. Mekanisme ini memastikan bahwa FPK dapat menjalankan fungsinya

dengan baik, serta beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial yang ada.

Perencanaan dan Pengorganisasian

Pada awalnya, FPK merumuskan program kerja berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Program-program ini kemudian dibahas dan disusun dalam forum-forum yang melibatkan berbagai pihak. Di tingkat pusat, perencanaan ini melibatkan kementerian-kementerian yang memiliki kaitan langsung dengan pembauran kebangsaan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan.

Setelah perencanaan, FPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan menyesuaikan program yang ada dengan kondisi lokal. Misalnya, di daerah yang memiliki masalah ketegangan sosial antaragama, FPK di tingkat kabupaten/kota akan menyusun program-program yang lebih fokus pada dialog antaragama dan penyuluhan tentang pentingnya toleransi.

Implementasi Program

Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah implementasi. FPK memiliki berbagai mekanisme untuk melaksanakan programnya, antara lain melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, kursus, dan pertemuan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Implementasi ini dilakukan dengan menggandeng berbagai

lembaga sosial, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh setempat yang memiliki pengaruh positif dalam masyarakat.

Mekanisme implementasi juga melibatkan masyarakat langsung. Di tingkat kecamatan/desa, FPK bekerja sama dengan pemerintah setempat dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mempertemukan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Evaluasi dan Monitoring

Untuk memastikan bahwa program yang dijalankan efektif, FPK melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Di tingkat pusat, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah diterapkan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Di tingkat daerah, evaluasi ini lebih spesifik lagi, untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal. Program-program yang tidak berjalan dengan baik akan diperbaiki, sementara yang berhasil akan dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut.

FPK di setiap tingkatan pemerintahan juga bertugas untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program-program pembauran kebangsaan. Monitoring ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga sosial untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembauran kebangsaan di tingkat lokal.

Kesimpulan

Struktur organisasi dan mekanisme kerja FPK yang jelas dan terkoordinasi adalah kunci dalam pelaksanaan program pembauran kebangsaan yang efektif. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat, FPK dapat memastikan bahwa setiap elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam proses integrasi sosial. Mekanisme yang terstruktur memungkinkan FPK untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, mengoptimalkan kebijakan yang ada, serta memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam.

Daftar Referensi:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

3.3 Kriteria Pemilihan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan

Pemilihan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan forum tersebut dalam menjalankan tugasnya. Anggota FPK bukan hanya mereka yang memiliki jabatan formal dalam pemerintahan, tetapi juga melibatkan berbagai

elemen masyarakat yang memiliki pengaruh positif dalam memperkuat integrasi sosial dan membangun keharmonisan antar kelompok. Oleh karena itu, kriteria pemilihan anggota FPK harus didasarkan pada beberapa aspek yang memastikan kualitas dan efektivitas forum ini dalam mewujudkan tujuan pembauran kebangsaan.

1. Kriteria Dasar dalam Pemilihan Anggota FPK

Menurut Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, anggota FPK di berbagai tingkat pemerintahan harus memiliki kualitas dan kapasitas tertentu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kriteria utama yang menjadi dasar pemilihan anggota FPK meliputi:

Komitmen terhadap Keberagaman dan Toleransi

Anggota FPK harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keberagaman dan komitmen yang kuat untuk memajukan toleransi di masyarakat. Mereka harus mampu menghargai perbedaan etnis, agama, budaya, dan latar belakang sosial lainnya. Pemilihan anggota yang memiliki pandangan yang terbuka dan inklusif akan memastikan bahwa FPK dapat menjalankan tugasnya sebagai penghubung antar kelompok dengan lebih efektif.

Pengalaman dalam Masyarakat atau Organisasi Sosial

Anggota FPK diharapkan memiliki pengalaman dalam memimpin atau terlibat dalam organisasi sosial, kemasyarakatan, atau kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Pengalaman ini penting untuk

memastikan bahwa mereka mampu memahami dinamika sosial dan berinteraksi dengan berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda. Mereka yang memiliki rekam jejak dalam penyelesaian konflik sosial, kegiatan dialog antaragama, atau kegiatan sosial lainnya akan lebih mudah dalam menjalankan tugasnya di FPK.

Kredibilitas dan Integritas

Kredibilitas dan integritas adalah hal yang sangat penting dalam pemilihan anggota FPK. Anggota FPK harus memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat dan diakui sebagai individu yang memiliki integritas tinggi. Karena FPK berperan dalam membangun keharmonisan sosial dan mengelola keberagaman, anggota FPK perlu dijamin bebas dari konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam aktivitas yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Anggota FPK yang memiliki integritas akan lebih mudah menjalankan peran sebagai mediator dan fasilitator dalam proses pembauran kebangsaan.

2. Kriteria Berdasarkan Representasi Kelompok Sosial

FPK juga harus mencerminkan keberagaman yang ada di masyarakat, dan oleh karena itu, pemilihan anggota perlu memperhatikan representasi berbagai kelompok sosial yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, dengan berbagai suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa FPK memiliki anggota yang mewakili

seluruh kelompok tersebut, baik dari segi agama, suku, gender, dan kelompok minoritas lainnya.

Representasi Etnis dan Agama

Anggota FPK harus mencerminkan keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia. Setiap suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia harus memiliki perwakilannya di dalam FPK. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan dalam forum ini dapat diterima oleh semua kelompok, serta menghindari dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Misalnya, untuk daerah dengan mayoritas Muslim, FPK juga harus melibatkan perwakilan dari agama-agama lain agar tercipta keseimbangan.

Perwakilan Kelompok Minoritas

Selain representasi kelompok mayoritas, penting juga untuk memastikan bahwa kelompok minoritas mendapatkan perwakilan yang memadai dalam FPK. Kelompok minoritas ini bisa berupa kelompok agama minoritas, suku bangsa tertentu, atau kelompok dengan keterbatasan tertentu seperti difabel. Perwakilan dari kelompok-kelompok ini akan memastikan bahwa kebijakan dan program pembauran kebangsaan yang dijalankan juga memperhatikan hak dan kebutuhan mereka.

Peran Gender dalam FPK

Selain keberagaman etnis dan agama, penting juga untuk memastikan bahwa peran gender diperhatikan dalam pemilihan anggota FPK. Anggota FPK harus mencerminkan keseimbangan antara pria dan wanita, dengan memberikan

kesempatan yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembauran kebangsaan. Kehadiran perempuan dalam FPK akan membawa perspektif yang lebih luas, serta memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya memperhatikan kelompok tertentu saja, tetapi juga inklusif bagi semua pihak.

3. Kriteria Berdasarkan Kemampuan dan Kompetensi

Selain komitmen, pengalaman, dan representasi kelompok sosial, anggota FPK juga harus dipilih berdasarkan kemampuan dan kompetensinya. Anggota FPK harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi, mediasi, dan penyelesaian konflik. Keahlian ini sangat penting dalam menjalankan peran sebagai fasilitator dalam proses pembauran kebangsaan.

Kemampuan Berkomunikasi dan Bernegosiasi

Anggota FPK harus mampu berkomunikasi dengan baik dan memiliki keterampilan dalam bernegosiasi. Mereka harus mampu mengatur dialog yang konstruktif antara berbagai pihak yang memiliki pandangan yang berbeda. Kemampuan bernegosiasi ini sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan menemukan titik temu antara kelompok yang berbeda, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila.

Kemampuan dalam Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Mediasi dan penyelesaian konflik adalah bagian integral dari tugas FPK. Anggota FPK yang memiliki kemampuan dalam bidang ini dapat membantu menyelesaikan

perbedaan yang muncul antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam ketegangan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis pada dialog dan pemahaman bersama, FPK dapat mengurangi potensi konflik dan memfasilitasi terciptanya kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Proses Pemilihan Anggota FPK

Proses pemilihan anggota FPK harus transparan dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dalam proses ini, masyarakat juga harus dilibatkan, baik melalui perwakilan tokoh masyarakat, organisasi sosial, maupun elemen-elemen lain yang terkait. Proses pemilihan yang terbuka dan adil akan memastikan bahwa FPK memiliki anggota yang berkualitas, representatif, dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Kesimpulan

Pemilihan anggota FPK adalah langkah penting untuk memastikan bahwa forum ini dapat berfungsi dengan efektif dalam menjaga dan memperkuat pembauran kebangsaan. Kriteria pemilihan yang didasarkan pada komitmen terhadap keberagaman, pengalaman sosial, kredibilitas, serta kemampuan dalam berkomunikasi dan menyelesaikan konflik sangat penting untuk memastikan kualitas dan efektivitas FPK. Selain itu, representasi yang adil dari berbagai kelompok sosial, termasuk kelompok minoritas dan gender, juga harus diperhatikan. Dengan pemilihan yang tepat, FPK akan mampu

memainkan peran strategisnya dalam menjaga persatuan Indonesia yang majemuk.

Daftar Referensi:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

3.4 Sinergi Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, dan Masyarakat

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam masyarakat. Di Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiganya memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Dalam subbab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana masing-masing pihak ini berperan dalam memperkuat pembauran kebangsaan, serta bagaimana mereka dapat bekerja bersama-sama dalam kerangka Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Sinergi Pembauran Kebangsaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital dalam implementasi pembauran kebangsaan, terutama karena mereka berada lebih dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung dinamika sosial yang ada di wilayah mereka. Pemerintah daerah bertugas untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional. FPK di tingkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus dapat memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar dapat diterima oleh masyarakat setempat, serta menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif antar kelompok yang berbeda.

Salah satu peran penting pemerintah daerah adalah menyediakan fasilitas dan anggaran untuk pelaksanaan program-program pembauran kebangsaan, seperti pelatihan lintas budaya, seminar, atau kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah daerah juga berfungsi sebagai fasilitator, memediasi antara kelompok-kelompok yang mungkin memiliki ketegangan atau perbedaan. Dengan demikian, pemerintah daerah bukan hanya sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga sebagai penyedia ruang dan sumber daya yang mendukung proses integrasi sosial di masyarakat [1].

Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pembauran kebangsaan melibatkan seluruh elemen masyarakat, dari kelompok mayoritas hingga kelompok minoritas. Program-program yang ada harus bisa menjangkau

berbagai lapisan masyarakat agar proses pembauran kebangsaan dapat berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah. Salah satu contoh inisiatif dari pemerintah daerah yang dapat mendukung hal ini adalah dengan membentuk kelompok kerja FPK di tingkat kecamatan atau desa, yang lebih mudah berinteraksi langsung dengan masyarakat.

2. Peran Tokoh Adat dalam Memperkuat Pembauran Kebangsaan

Tokoh adat memiliki peran yang tak kalah penting dalam menyukseskan pembauran kebangsaan di Indonesia. Mereka adalah pemimpin yang dihormati oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan nilai-nilai tradisional. Tokoh adat sering menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebiasaan masyarakat setempat. Mereka memainkan peran sebagai penghubung yang penting dalam memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan konteks lokal, dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Tokoh adat juga memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan, mengingat mereka sangat dihormati dan memiliki kewenangan moral yang tinggi di komunitasnya. Dalam konteks FPK, tokoh adat dapat menjadi fasilitator penting dalam proses mediasi antar kelompok yang berbeda. Mereka dapat membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adat, serta mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap integrasi sosial yang berbasis pada keberagaman [2].

Sebagai contoh, di beberapa daerah di Indonesia, seperti Papua atau Kalimantan, tokoh adat sering kali menjadi pihak pertama yang mengatur dialog antara pemerintah dan masyarakat adat terkait kebijakan pembangunan. Melalui tokoh adat, masyarakat lokal merasa lebih dihargai dan diakui keberadaannya, dan ini mendorong rasa saling percaya yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.

3. Peran Masyarakat dalam Proses Pembauran Kebangsaan

Masyarakat merupakan elemen utama dalam keberhasilan pembauran kebangsaan. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, pembauran kebangsaan tidak akan berjalan dengan efektif. Masyarakat, terutama yang berada di tingkat desa dan kecamatan, memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung toleransi dan kerukunan sosial. Mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan keberagaman setiap hari, baik dalam kegiatan sosial, budaya, maupun agama.

Masyarakat harus merasa diberdayakan untuk mengambil bagian dalam berbagai kegiatan FPK yang ada. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dalam merancang program-program pembauran kebangsaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Melalui pertemuan dan diskusi yang terbuka, masyarakat dapat mengungkapkan perasaan mereka terkait keberagaman, serta mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam hidup berdampingan dengan kelompok lain. Keterlibatan masyarakat dalam FPK dapat membantu mengurangi ketegangan sosial yang muncul, serta mendorong terciptanya

kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga keharmonisan sosial.

Di sisi lain, masyarakat juga berperan dalam memastikan bahwa keberagaman yang ada dihargai dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan gotong-royong, penyelenggaraan acara budaya, atau bahkan dialog antaragama, masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi perubahan sosial yang mendukung pembauran kebangsaan. Masyarakat yang terlibat aktif akan menjadi agen perubahan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan persatuan, serta menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman.

4. Sinergi antara Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, dan Masyarakat

Sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembauran kebangsaan di Indonesia. Ketiga elemen ini harus bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Pemerintah daerah bertugas menyediakan kebijakan dan sumber daya, tokoh adat membantu memediasi dan mengedukasi masyarakat, sementara masyarakat sendiri harus aktif dalam menjalankan program-program pembauran kebangsaan di tingkat lokal.

Keberhasilan sinergi ini sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Proses pembauran kebangsaan harus dijalankan dengan semangat gotong-royong, di mana setiap pihak saling

mendukung dan menghargai peran masing-masing. Dalam hal ini, FPK berfungsi sebagai platform untuk mengkoordinasikan kerjasama antara semua pihak, memastikan bahwa setiap suara didengar dan bahwa solusi yang ditemukan bersifat inklusif dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat.

Kesimpulan

Sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat adalah elemen kunci dalam menciptakan pembauran kebangsaan yang sukses. Pemerintah daerah menyediakan kebijakan dan infrastruktur untuk mendukung proses ini, sementara tokoh adat berperan dalam menjaga kesatuan nilai budaya dan memberi arahan kepada masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah aktor utama dalam menjaga kerukunan dan persatuan melalui partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Dengan kolaborasi yang baik antara ketiga pihak ini, pembauran kebangsaan dapat berjalan efektif, mencegah konflik sosial, dan memperkuat identitas nasional Indonesia yang beragam.

Daftar Referensi:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

3.5 Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan

Penyelenggaraan pembauran kebangsaan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) memang memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keharmonisan sosial di Indonesia yang majemuk. Namun, dalam pelaksanaannya, FPK menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan integrasi sosial yang diharapkan. Hambatan-hambatan ini datang dari berbagai aspek, baik itu struktural, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut secara mendalam dan mencari solusi yang tepat agar FPK dapat berjalan dengan efektif.

Di subbab ini, kita akan membahas beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh FPK dalam menjalankan tugasnya, serta solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasinya. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan tantangan eksternal yang mempengaruhi proses integrasi sosial di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang hambatan ini, FPK dapat menemukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitasnya dalam membangun kebersamaan di tengah keberagaman.

1. Hambatan dalam Koordinasi Antar Tingkatan Pemerintahan

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh FPK adalah koordinasi yang kurang efektif antara tingkat pemerintahan yang berbeda. Pemerintah pusat seringkali

merumuskan kebijakan yang sangat luas, namun implementasinya di tingkat daerah tidak selalu berjalan mulus. Hambatan dalam koordinasi ini bisa muncul karena perbedaan prioritas antar pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya pemahaman mengenai kebijakan yang ada.

Solusi untuk masalah ini adalah dengan memperkuat komunikasi antar tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat perlu memberikan panduan yang jelas dan mendetail tentang bagaimana kebijakan pembauran kebangsaan dapat diterapkan di daerah. Selain itu, peran FPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus lebih diperkuat dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat dan lembaga adat, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterima dan dijalankan sesuai dengan konteks lokal. Pelatihan dan workshop yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan pemerintahan juga dapat membantu memperjelas tujuan dan mekanisme kerja FPK di tingkat daerah [1].

2. Ketidakcocokan Program dengan Kebutuhan Lokal

Hambatan lainnya adalah ketidakcocokan antara program yang disusun oleh FPK di tingkat pusat dengan kebutuhan masyarakat lokal. Program-program yang bersifat umum seringkali tidak mempertimbangkan kearifan lokal, adat istiadat, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Hal ini bisa membuat program-program tersebut tidak efektif atau bahkan ditolak oleh masyarakat yang merasa bahwa kebijakan tersebut tidak relevan dengan kehidupan mereka.

Solusi untuk masalah ini adalah dengan mendorong adanya pendekatan yang lebih berbasis pada konteks lokal. FPK di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan/desa harus terlibat lebih dalam dalam perencanaan program, sehingga program yang dilaksanakan bisa lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas ini juga memastikan bahwa masyarakat ikut serta dalam merancang dan mengimplementasikan program, yang akan meningkatkan rasa kepemilikan dan keberhasilan program itu sendiri. Ini juga mengarah pada terciptanya solusi yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi keinginan pemerintah pusat, tetapi juga keinginan masyarakat [2].

3. Ketegangan Sosial Antar Kelompok yang Masih Tinggi

Indonesia, meskipun dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetap menghadapi tantangan besar terkait ketegangan sosial antar kelompok, baik itu agama, etnis, maupun ideologi. Ketegangan ini seringkali diperburuk oleh stereotip, prasangka, dan ketidakpercayaan antar kelompok. Hambatan sosial ini menjadi kendala besar dalam menjalankan pembauran kebangsaan, karena tanpa rasa saling percaya, sulit untuk membangun kerjasama yang efektif antar kelompok yang berbeda.

Untuk mengatasi masalah ini, FPK harus menempatkan dialog sosial sebagai prioritas utama. Kegiatan dialog antar kelompok agama, etnis, dan budaya perlu difasilitasi secara intensif. Di tingkat daerah, misalnya, pemerintah bersama dengan tokoh agama dan tokoh adat dapat mengadakan forum-forum diskusi yang mempertemukan kelompok-

kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dialog ini bertujuan untuk membuka wawasan, mengurangi stereotip, dan membangun saling pengertian antar kelompok. Program-program pembauran kebangsaan juga harus mencakup kegiatan sosial yang memungkinkan kelompok-kelompok tersebut untuk bekerja sama dalam proyek-proyek kemanusiaan atau pembangunan, yang dapat memperkuat hubungan antar kelompok [3].

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pentingnya Pembauran Kebangsaan

Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh FPK adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembauran kebangsaan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Banyak masyarakat yang masih menganggap keberagaman sebagai sumber konflik, bukan sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi yang memadai tentang keberagaman, toleransi, dan hak asasi manusia.

Solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah melalui pendidikan dan penyuluhan yang intensif mengenai pembauran kebangsaan. FPK harus berperan aktif dalam menyediakan materi-materi pendidikan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberagaman dan kesetaraan. Program pendidikan multikultural, yang mengajarkan anak-anak dan generasi muda untuk menghargai perbedaan, sangat penting. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang berbasis pada

penghargaan terhadap perbedaan. Kampanye publik yang mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman [4].

5. Tantangan Globalisasi dan Pengaruh Budaya Asing

Globalisasi membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan nilai budaya yang cepat dan masif dapat mengancam kelestarian budaya lokal dan memperlemah rasa kebangsaan yang berbasis pada nilai-nilai lokal. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah terpengaruh oleh budaya asing yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan karakter bangsa Indonesia. Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat pendidikan budaya yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. FPK juga harus mendorong pelestarian seni dan budaya tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga identitas budaya bangsa. Penggunaan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan kebudayaan lokal dan nilai-nilai kebangsaan juga harus digalakkan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara penerimaan terhadap pengaruh global dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal [5].

Kesimpulan

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas FPK memang cukup banyak, namun dengan solusi yang tepat, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi. Dengan

memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan, memastikan relevansi program-program pembauran kebangsaan, meningkatkan dialog sosial, serta memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberagaman, FPK akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Pembauran kebangsaan yang sukses membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh adat untuk menciptakan Indonesia yang lebih harmonis dan bersatu dalam perbedaan.

Daftar Referensi:

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Forum Pembauran Kebangsaan*.
2. Suryadinata, L. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
3. Hidayat, A. (2017). *Relasi Agama dan Keberagaman di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
4. Taylor, C. (1992). *Multiculturalism and "The Politics of Recognition"*. Princeton University Press.
5. Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Paris: Alcan.



4. IMPLEMENTASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DI TINGKAT DAERAH

Pembauran kebangsaan bukanlah wacana yang cukup berhenti di ruang diskusi atau dokumen kebijakan. Ia harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah administratif yang menjadi titik temu antar identitas sosial. Oleh karena itu, implementasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat daerah menjadi elemen penting dalam merawat keberagaman dan mencegah potensi konflik horizontal.

Forum ini tidak hanya sekadar forum formal, tetapi menjadi ruang hidup yang memfasilitasi dialog, kerja sama,

dan rekonsiliasi sosial. Maka dari itu, pelaksanaannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap daerah memiliki kekhasan, baik dari segi demografi, historis, maupun kultural. Oleh karena itu, strategi implementasi FPK harus disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

Bab ini membahas secara sistematis strategi pembauran kebangsaan di tiga level pemerintahan daerah, yakni kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan. Selain itu, ditampilkan juga studi kasus dari berbagai daerah sebagai bentuk pembelajaran praktik baik yang dapat direplikasi atau disesuaikan.

4.1 Strategi Pembauran di Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota, keberadaan FPK harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan sosial. Hal ini karena wilayah ini memiliki kompleksitas tinggi dalam hal kependudukan, mobilitas sosial, dan dinamika politik lokal. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak hanya membentuk FPK secara formal, tetapi juga memberikan dukungan anggaran, program, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Langkah awal yang mendasar adalah adanya komitmen kepala daerah yang tercermin dalam regulasi daerah. Regulasi tersebut harus bersifat operasional dan bukan sekadar administratif. Misalnya, mengatur peran FPK dalam mengantisipasi gejolak sosial pasca pemilu, konflik lahan, atau gesekan antar komunitas pendatang dan warga lokal.

Bakesbangpol sebagai leading sector, perlu melibatkan FPK dalam penyusunan peta rawan konflik dan rencana aksi kebangsaan tahunan. Di sinilah pentingnya integrasi FPK dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan kebijakan lintas sektor.

Selain itu, kapasitas anggota FPK perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis seperti mediasi konflik, fasilitasi diskusi publik, serta pengetahuan dasar tentang regulasi kebhinekaan. Kolaborasi dengan LSM dan perguruan tinggi bisa memperkuat aspek akademik dan sosial dari program FPK. Apabila hal ini konsisten dilakukan, maka FPK tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga aktor strategis dalam membangun ketahanan sosial [1].

4.2 Strategi Pembauran di Tingkat Kecamatan

Kecamatan sebagai unit administratif menengah seringkali menjadi tempat pertama munculnya gejala konflik sosial yang bermula dari masalah antar warga. Oleh karena itu, FPK di kecamatan perlu dirancang sebagai forum kewaspadaan dini sekaligus tempat pemulihan hubungan sosial pasca konflik.

Penting bagi camat untuk tidak hanya menjalankan tugas birokratis, melainkan juga memainkan peran sosial sebagai pemersatu masyarakat. Camat perlu memberikan ruang dialog, bukan hanya forum formal seperti rapat koordinasi, tetapi juga dalam bentuk kegiatan kultural dan partisipatif.

Strategi yang dapat ditempuh mencakup pemetaan komunitas berbasis kepercayaan dan etnis, lalu mengundang mereka dalam forum silaturahmi lintas tokoh secara rutin. Dalam forum ini, bukan hanya isu-isu besar yang dibahas, tetapi juga keresahan kecil yang seringkali menjadi akar konflik, seperti distribusi bantuan, hak atas ruang publik, dan diskriminasi tak langsung.

Program "Kecamatan Rukun" di Sleman dapat menjadi inspirasi bahwa keterlibatan pemuda dan teknologi digital dapat memperluas dampak pembauran. Keterlibatan tokoh perempuan juga penting untuk membangun inklusi gender dalam narasi kebangsaan. Hal ini tidak hanya memperluas perspektif, tetapi juga membentuk komunitas sosial yang resilien terhadap provokasi [2].

FPK di kecamatan juga perlu dilengkapi dengan mekanisme laporan cepat potensi gesekan sosial dan membentuk unit mediasi berbasis warga yang bersifat sukarela namun terlatih.

4.3 Strategi Pembauran di Tingkat Desa/Kelurahan

Di tingkat desa dan kelurahan, pembauran kebangsaan mesti hadir dalam bentuk yang paling kontekstual dan membumi. Masyarakat di tingkat ini sangat dipengaruhi oleh relasi kekerabatan, adat, dan rutinitas sosial yang khas. Maka, strategi FPK harus berbasis budaya, bukan birokrasi.

Kepala desa dan lurah perlu didorong untuk mengenali peta sosial desanya. Siapa kelompok minoritas? Siapa

komunitas baru? Bagaimana relasi antar kampung? Dengan pemetaan yang baik, maka langkah pembauran bisa lebih tepat sasaran.

Forum informal seperti arisan, pengajian, ronda malam, atau gotong royong bisa dimanfaatkan sebagai titik masuk untuk menyisipkan nilai-nilai kebangsaan. Di banyak desa, nilai kebangsaan tidak selalu diterjemahkan melalui simbol-simbol negara, melainkan melalui nilai saling menghargai dan menjaga kerukunan.

Pengalaman Desa Kotaraja di NTT mengajarkan bahwa FPK bisa menjadi mediator sosial setelah peristiwa konflik politik. Hal ini hanya bisa dicapai jika FPK didukung oleh tokoh lokal yang memiliki legitimasi sosial, bukan sekadar legalitas administratif [3].

Selain itu, keterlibatan FPK dalam musrenbangdes bukan hanya formalitas. Mereka bisa menjadi corong warga yang sering tidak bersuara dalam forum desa, seperti kelompok perempuan, lansia, dan migran musiman.

4.4 Studi Kasus: Keberhasilan Pembauran di Berbagai Daerah

Praktik baik pembauran kebangsaan dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus pembanding yang berguna. Di Kota Singkawang, keberagaman etnik diakomodasi bukan dengan sekadar slogan, tetapi dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan kegiatan budaya. Ini menunjukkan bahwa pembauran yang tulus muncul dari kolaborasi dan penghormatan terhadap kearifan lokal [4].

Panggung Rakyat Multikultur di Surakarta menunjukkan bagaimana ruang publik bisa menjadi laboratorium kebangsaan. Ketika orang dari berbagai etnis menampilkan seni dan budaya mereka secara berdampingan, rasa saling menghargai tumbuh secara alami. FPK di sana tidak hanya menyelenggarakan acara, tetapi juga menjadi kurator sosial yang merajut relasi antar komunitas [5].

Di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, pendekatan pembauran dilakukan secara hati-hati. Komunitas Baduy tetap menjaga identitas adatnya, tetapi terbuka terhadap interaksi edukatif seperti program pertukaran pelajar budaya. Ini menunjukkan bahwa pembauran tidak harus berarti pembauran identitas, melainkan pembauran dalam rasa saling menghormati [6].

Studi-studi ini membuktikan bahwa keberhasilan FPK sangat ditentukan oleh konteks lokal, sensitivitas terhadap budaya, dan keberanian untuk membuka ruang dialog. Dengan pendekatan yang tepat, FPK dapat menjadi katalisator penting dalam menjaga keutuhan bangsa dari bawah.

Daftar Referensi

1. Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). *Data Pembentukan dan Aktivitas FPK Daerah*. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, hlm. 17.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman. (2023). *Program Kecamatan Rukun: Laporan Tahunan Bakesbangpol*, hlm. 5–8.
3. [3] Laporan Evaluasi Pascakonflik Desa Kotaraja. (2020). *Dinas Sosial Provinsi NTT*, hlm. 22–23.

4. Setara Institute. (2022). *Indeks Kota Toleran Tahun 2022*, hlm. 12–15.
5. Pemerintah Kota Surakarta. (2021). *Dokumen Program Panggung Rakyat Multikultur*, Bakesbangpol Surakarta, hlm. 3.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. (2022). *Laporan Pertukaran Pelajar Budaya Desa Kanekes*, hlm. 9–11.



5. STRATEGI EFEKTIF SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI

Mewujudkan pembauran kebangsaan bukan hanya perkara membentuk forum atau merancang program. Salah satu kunci utamanya terletak pada kemampuan menyampaikan pesan secara tepat dan bermakna. Sosialisasi yang efektif membuka ruang pemahaman bersama, menghilangkan prasangka, dan membangun keterlibatan aktif masyarakat.

Namun demikian, realitas lapangan seringkali menunjukkan bahwa pesan-pesan tentang kebinekaan dan persatuan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini bisa disebabkan oleh metode komunikasi yang

kurang sesuai, bahasa yang terlalu birokratis, atau media yang tidak relevan dengan segmentasi audiens.

Bab ini akan mengupas bagaimana strategi sosialisasi dan komunikasi dapat diperkuat. Mulai dari teknik penyampaian yang sederhana namun berdampak, pentingnya komunikasi antarbudaya, hingga peran media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai pembauran kebangsaan. Harapannya, setiap daerah dapat menyesuaikan pendekatannya berdasarkan karakteristik masyarakat setempat.

5.1 Teknik dan Metode Efektif dalam Sosialisasi

Dalam konteks pembauran kebangsaan, sosialisasi tidak cukup hanya bersifat informatif. Ia harus persuasif, partisipatif, dan membumi. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pola komunikasi masyarakat setempat.

Teknik tatap muka masih menjadi metode paling ampuh, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses digital. Kegiatan seperti forum warga, kunjungan tokoh masyarakat, atau diskusi kelompok kecil mampu menciptakan ruang yang lebih hangat dan inklusif. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, mengutarakan keresahan, dan merasa dilibatkan secara aktif.

Di sisi lain, untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat urban, metode visual seperti video pendek, poster infografis, dan kampanye audiovisual terbukti efektif. Sebuah

survei nasional oleh Kominfo pada tahun 2021 menunjukkan bahwa **konten visual memiliki daya serap informasi 60% lebih tinggi dibandingkan teks biasa** [1]. Penelitian komunikasi visual oleh Kress dan van Leeuwen juga menyatakan bahwa gambar mampu membangun koneksi emosional yang lebih cepat dibandingkan narasi tertulis panjang [2]. Oleh karena itu, pesan pembauran perlu disampaikan dalam bentuk yang mudah dicerna dan menarik secara visual.

Tak kalah penting, metode naratif atau storytelling juga bisa digunakan untuk menyentuh sisi emosional. Cerita-cerita tentang keberhasilan harmoni antarsuku, kisah warga dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai, atau tokoh lokal yang menjadi teladan toleransi bisa menjadi bagian dari kampanye yang kuat. Menurut teori naratif Walter Fisher, manusia pada dasarnya adalah "homo narrans"—makhluk yang memaknai dunia melalui cerita [3]. Maka, kampanye yang menyentuh hati akan lebih bertahan dibandingkan sekadar informasi normatif.

Selain itu, strategi komunikasi dua arah juga sangat disarankan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berkesempatan memberikan umpan balik. Kegiatan ini membangun rasa kepemilikan terhadap pesan yang disampaikan.

5.2 Komunikasi Antarbudaya sebagai Kunci Keberhasilan

Komunikasi antarbudaya adalah proses menyampaikan pesan antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks FPK, kemampuan memahami dan menghormati perbedaan adalah prasyarat utama untuk membangun dialog yang konstruktif.

Penting untuk memahami bahwa setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan makna. Misalnya, masyarakat Jawa cenderung menggunakan bahasa yang alus dan penuh sindiran halus, sementara masyarakat Bugis lebih langsung dan tegas. Perbedaan ini, jika tidak dipahami, bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik. Hall (1976) dalam teorinya tentang konteks komunikasi mengelompokkan budaya menjadi "high context" dan "low context". Budaya high context (seperti Jepang atau Indonesia) lebih banyak mengandalkan isyarat non-verbal dan konteks situasional, sedangkan budaya low context (seperti Jerman atau AS) mengutamakan kejelasan verbal [4].

Dalam praktik pembauran, hal ini penting diketahui agar komunikasi tidak hanya efektif secara linguistik, tetapi juga secara simbolik dan budaya. Oleh karena itu, anggota FPK perlu dibekali pelatihan komunikasi antarbudaya, termasuk pengetahuan dasar tentang nilai-nilai budaya lokal, bahasa tubuh, serta cara merespons ketegangan. Salah satu pendekatan yang diakui dalam studi komunikasi adalah model **intercultural competence**, yaitu kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan latar budaya lain [5].

Di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pelatihan komunikasi lintas budaya menjadi bagian dari penguatan kapasitas FPK sejak 2020. Hasilnya, angka konflik horizontal menurun dan partisipasi komunitas minoritas meningkat dalam forum-forum dialog [6]. Praktik ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan secara lebih luas di daerah lain.

5.3 Dialog Interaktif dengan Masyarakat: Metode dan Tantangan

Dialog bukan hanya sarana menyampaikan pesan, tetapi juga wadah untuk mendengar dan memahami. Dalam konteks pembauran kebangsaan, dialog interaktif sangat penting karena memungkinkan semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Namun, membangun dialog yang efektif tidaklah mudah. Tantangan pertama adalah adanya kesenjangan antara aparat dan masyarakat. Banyak warga yang masih merasa enggan berbicara terbuka karena trauma masa lalu, perasaan dikucilkan, atau ketidakpercayaan pada institusi.

Untuk menjembatani ini, dialog harus difasilitasi secara netral dan partisipatif. Fasilitator sebaiknya berasal dari unsur masyarakat yang memiliki legitimasi sosial. Metode dialog dapat menggunakan teknik world café, diskusi terbuka, hingga simulasi resolusi konflik. Menurut David Bohm (1996), dialog yang bermakna adalah proses kolektif berpikir bersama untuk membongkar asumsi, bukan sekadar adu argumen [7].

Selain itu, waktu dan tempat pelaksanaan dialog juga perlu diperhatikan. Forum yang dilakukan di kantor

pemerintahan cenderung formal dan membuat warga enggan berbicara. Sebaliknya, dialog yang dilakukan di rumah ibadah, balai desa, atau bahkan warung kopi bisa menciptakan suasana yang lebih akrab dan komunikatif.

Studi oleh LIPI (2021) menunjukkan bahwa **dialog yang dilakukan dalam suasana nonformal menghasilkan respons partisipatif 3 kali lebih tinggi dibanding forum resmi** [8]. Temuan ini mendukung perlunya pendekatan kontekstual dan sensitif terhadap dinamika sosial setempat. Untuk memperkuat dampaknya, hasil dari dialog hendaknya didokumentasikan dan ditindaklanjuti secara konkret.

5.4 Penggunaan Media Sosial dalam Sosialisasi Pembauran Kebangsaan

Di era digital, media sosial menjadi kanal komunikasi yang tak terhindarkan. Menurut laporan We Are Social (2023), terdapat lebih dari 191 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, dengan rata-rata penggunaan 3 jam 17 menit per hari [9]. Angka ini menunjukkan potensi besar dalam menyampaikan pesan pembauran secara masif dan cepat.

Namun, tantangan utamanya adalah membanjirnya konten negatif, ujaran kebencian, dan hoaks yang sering kali memperkeruh suasana keberagaman. Untuk itu, penggunaan media sosial dalam sosialisasi pembauran harus disertai strategi yang cermat dan etis.

Strategi pertama adalah mengelola akun resmi FPK di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Akun tersebut sebaiknya dikelola oleh tim yang memiliki

pemahaman komunikasi digital dan sensitivitas sosial. Konten yang disampaikan harus kreatif, edukatif, dan menyentuh nilai-nilai empati. Model "Uses and Gratifications" dalam komunikasi massa menjelaskan bahwa khalayak aktif memilih konten yang relevan dengan kebutuhan personal dan sosial mereka [10]. Maka, pesan-pesan FPK harus menjawab kebutuhan itu—baik untuk hiburan, identitas, maupun interaksi sosial.

Strategi kedua adalah melibatkan influencer lokal, tokoh agama, atau tokoh pemuda dalam kampanye digital. Pengaruh mereka di komunitas dapat meningkatkan jangkauan dan kepercayaan publik terhadap pesan yang dibawa. Misalnya, kampanye #BanjarmasinRukun oleh FPK Banjarmasin yang berhasil menjangkau lebih dari 50.000 interaksi digital di tahun 2022 [11].

Strategi ketiga adalah mengembangkan kampanye hashtag, tantangan positif (positive challenge), dan lomba konten kreatif bertema kebangsaan. Selain sebagai alat penyebaran pesan, ini juga menciptakan keterlibatan dua arah dengan masyarakat pengguna media sosial.

Daftar Referensi

1. Kominfo RI. (2021). *Survei Nasional Pemanfaatan Media Sosialisasi Publik*, hlm. 12.
2. Kress, G. & van Leeuwen, T. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. Routledge, hlm. 27–35.

3. Fisher, W.R. (1984). *Narration as a Human Communication Paradigm: The Case of Public Moral Argument*. Communication Monographs, hlm. 1–22.
4. Hall, E.T. (1976). *Beyond Culture*. Anchor Books, hlm. 91–96.
5. Bennett, M. (1998). *Intercultural Competence: A Developmental Model*. Portland State University, hlm. 7–8.
6. Pemerintah Kabupaten Sorong. (2022). *Laporan Kegiatan Pelatihan Komunikasi Antarbudaya FPK*, Bakesbangpol Sorong, hlm. 5.
7. Bohm, D. (1996). *On Dialogue*. Routledge, hlm. 12–20.
8. LIPI. (2021). *Kajian Efektivitas Dialog Sosial di Indonesia*, Pusat Penelitian Politik, hlm. 17.
9. We Are Social & Hootsuite. (2023). *Digital 2023: Indonesia*, hlm. 39.
10. Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). *Uses and Gratifications Research*. Public Opinion Quarterly, hlm. 509–523.
11. Pemerintah Kota Banjarmasin. (2022). *Laporan Kampanye Media Sosial FPK Kota Banjarmasin*, hlm. 3.



6. KONFLIK DAN RESOLUSI: MENJAGA HARMONI SOSIAL

Konflik sosial adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, ras, dan budaya, gesekan antar kelompok bisa terjadi kapan saja. Namun, keberadaan konflik tidak selalu negatif. Justru dalam pengelolaan yang tepat, konflik dapat menjadi momen refleksi dan perbaikan sosial.

Sayangnya, dalam banyak kasus, konflik sosial diwarnai oleh ketegangan identitas. Ketika perbedaan dipolitisasi dan dikelola dengan buruk, gesekan kecil dapat membesar menjadi kekerasan massal. Oleh karena itu, menjaga harmoni sosial bukanlah sekadar wacana, tetapi kerja nyata

yang membutuhkan strategi, komitmen, dan empati dari berbagai pihak.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hadir sebagai ruang untuk menjembatani perbedaan. Dalam bab ini, kita akan mengulas secara mendalam akar konflik sosial berbasis identitas, teori-teori penyelesaiannya, studi kasus di Indonesia, serta strategi konkret yang dapat diterapkan oleh FPK di tingkat lokal. Harapannya, FPK tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar menjadi penjaga harmoni sosial yang tangguh.

6.1 Pemahaman Konflik Sosial Berbasis Ras, Suku, Agama, dan Budaya

Konflik sosial berbasis identitas merupakan jenis konflik yang paling kompleks dan sensitif. Identitas etnis, agama, dan budaya bukan sekadar label, tetapi melekat dalam cara pandang, emosi, dan makna hidup seseorang. Ketika identitas ini terancam atau tidak dihargai, respons defensif hingga agresif bisa muncul.

Menurut Horowitz (1985), konflik etnis lebih sulit diselesaikan karena menyentuh akar psikologis dan emosional masyarakat [1]. Identitas kelompok sering kali dibangun dalam jangka panjang, diwariskan secara turun-temurun, dan disertai dengan memori kolektif atas ketidakadilan atau perlakuan diskriminatif. Di sinilah letak kesulitannya—konflik berbasis identitas lebih dari sekadar persoalan materiil, melainkan eksistensial.

Di Indonesia, kita mengenal berbagai konflik berbasis identitas, seperti konflik Poso, Ambon, Sampit, hingga kerusuhan Mei 1998. Konflik-konflik tersebut menunjukkan bahwa isu-isu ekonomi, politik, dan sosial bisa memicu konflik horizontal bila dibungkus dalam kerangka identitas. Yang menjadi masalah adalah ketika negara atau institusi tidak mampu menyediakan ruang aman untuk ekspresi identitas tersebut secara damai.

Faktor pemicu konflik bisa berupa ketimpangan sosial, diskriminasi struktural, peminggiran budaya lokal, hingga ujaran kebencian di media sosial. Laporan dari Setara Institute (2021) menunjukkan peningkatan insiden intoleransi terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan sebanyak 15% dari tahun sebelumnya [2]. Sementara survei dari LIPI menyatakan bahwa ketidakadilan ekonomi kerap menjadi bahan bakar yang memperbesar potensi konflik berbasis SARA.

Pemahaman terhadap konflik sosial harus dilakukan secara multidimensi: sosiologis, historis, dan politis. FPK diharapkan mampu memetakan potensi konflik yang berbasis identitas, memahami dinamika lokalitasnya, serta merancang intervensi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

6.2 Teori dan Pendekatan Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan intuisi. Diperlukan pendekatan yang sistematis berdasarkan teori-teori yang sudah terbukti. Johan Galtung (1996) membedakan tiga jenis kekerasan: langsung (direct violence),

struktural, dan kultural [3]. Untuk menyelesaikan konflik, ketiganya harus dikenali dan diatasi.

Berikut penjelasan lengkap dari berbagai pendekatan resolusi konflik:

- **Transformasi Konflik (Conflict Transformation):** Pendekatan ini bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mengubah relasi sosial dan struktur yang menjadi akar permasalahan. Seperti yang dikemukakan oleh Lederach (1997), transformasi konflik menekankan perubahan berkelanjutan, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan sistem baru yang lebih adil[4].
- **Mediasi:** Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi dialog. Mediasi bertujuan membangun komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi bersama. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kapasitas mediator dan kesediaan pihak-pihak yang berseteru untuk terbuka dan fleksibel.
- **Negosiasi:** Dalam negosiasi, pihak-pihak yang berseteru berdialog langsung, sering kali dengan bantuan fasilitator, untuk mencapai kesepakatan damai. Negosiasi biasanya digunakan jika posisi kekuasaan relatif setara. Proses ini memerlukan keterampilan dalam kompromi dan pemahaman kepentingan bersama.
- **Arbitrase:** Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang memberikan keputusan final dan mengikat. Proses ini lebih formal dan sering digunakan dalam konflik hukum atau komersial, tetapi juga dapat diterapkan dalam konflik sosial jika semua pihak menyepakatinya.

- **Akomodasi Sosial:** Pendekatan ini bertujuan mengelola perbedaan dengan cara menciptakan struktur sosial yang memungkinkan berbagai kelompok hidup berdampingan secara damai, meski belum tentu saling menyetujui. Di Indonesia, akomodasi sosial tercermin dalam sistem musyawarah dan mekanisme adat.

FPK dapat menggunakan kombinasi dari pendekatan di atas. Tidak semua pendekatan cocok untuk setiap kasus. Namun, pelatihan dan penguatan kapasitas anggota FPK dalam pendekatan-pendekatan ini menjadi keharusan.

6.3 Studi Kasus Konflik dan Resolusi di Indonesia

Kasus Ambon (1999–2002): Konflik Ambon bermula dari ketegangan kecil antara pemuda Muslim dan Kristen. Ketegangan ini berkembang menjadi kerusuhan sektarian karena kegagalan negara dalam mengintervensi sejak dini. Lebih dari 5.000 orang tewas, dan lebih dari 700.000 orang mengungsi. Resolusi dilakukan melalui perjanjian Malino II pada 2002, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, dengan mengedepankan peran tokoh agama, pemuda, dan adat. Malino II berhasil menurunkan eskalasi karena mengakui hak kedua belah pihak dan mendorong pembangunan bersama[5].

Konflik Sampit (2001): Ketegangan antara etnis Madura dan Dayak meletus menjadi kekerasan brutal. Latar belakangnya adalah akumulasi sentimen etnis, persaingan ekonomi, dan ketimpangan pengakuan budaya lokal. Upaya rekonsiliasi dilakukan dengan program pemulangan Madura secara bertahap, penguatan narasi toleransi melalui media

lokal, serta pemulihan relasi sosial melalui peran tokoh adat. Pemerintah daerah kemudian membentuk forum lintas suku dan memperkuat pengajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah.

Kerusuhan Tolikara (2015): Konflik terjadi pada saat umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri, sementara kelompok pemuda Gereja Injili memprotes penggunaan pengeras suara. Kerusuhan menyebabkan pembakaran kios dan masjid. Pendekatan resolusi dilakukan melalui dialog kultural dengan melibatkan tokoh gereja dan pemuka agama Islam. Presiden dan tokoh nasional turun tangan, namun tetap menekankan pentingnya pendekatan adat dan lokal. Penyelesaian kasus ini menunjukkan bahwa konflik bisa diredam jika pendekatan dilakukan dengan menghormati kearifan lokal dan memperkuat komunikasi antarkelompok.

6.4 Strategi Preventif dan Kuratif dalam Menjaga Harmoni Sosial

Strategi Preventif:

- **Pendidikan Multikultural Sejak Dini:** Pendidikan toleransi harus dimulai sejak usia sekolah. Materi kurikulum dapat disisipkan dengan nilai-nilai keberagaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Penelitian Balitbang Kemendikbud (2020) menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan toleransi sejak dini memiliki empati sosial yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap ujaran kebencian [6].
- **Forum Remaja Pembauran:** Membentuk wadah bagi remaja lintas etnis dan agama untuk berdiskusi,

berkegiatan bersama, dan mengenal keberagaman secara langsung. Interaksi ini memperkuat kohesi sosial dan mencegah stereotip berkembang.

- **Lomba Video Toleransi:** Melibatkan generasi muda untuk memproduksi konten kreatif tentang nilai kebangsaan. Ini bisa menjadi alat efektif melawan narasi intoleransi yang banyak berkembang di media sosial.
- **Tokoh Lintas Iman:** Menggelar kegiatan sosial yang melibatkan tokoh lintas iman dapat menjadi simbol harmoni. Aktivitas seperti donor darah bersama, kerja bakti, atau kampanye damai memperlihatkan bahwa kerjasama bisa terjalin lintas identitas.
- **Pusat Informasi Anti-Hoaks:** Ujaran kebencian dan disinformasi menjadi bahan bakar konflik. FPK perlu membangun jejaring dengan relawan digital dan media lokal untuk menangkal isu-isu provokatif.

Strategi Kuratif:

- **Tim Reaksi Cepat Tanggap Konflik:** Dibentuk di setiap kecamatan, tim ini bertugas merespons indikasi konflik sebelum meluas. Terdiri dari unsur FPK, tokoh masyarakat, dan aparat.
- **Dialog Pascakonflik:** Setelah konflik mereda, dialog terbuka harus difasilitasi untuk membersihkan luka sosial. Kegiatan ini membantu membangun ulang kepercayaan yang sempat hancur.
- **Bantuan Hukum dan Psikososial:** Korban konflik sering kali kehilangan akses hukum dan mengalami trauma.

Bantuan hukum dan layanan psikososial menjadi bagian penting dari pemulihan jangka panjang.

- **Media Damai:** Bekerja sama dengan jurnalis lokal untuk memproduksi narasi positif, membingkai ulang pemberitaan yang berpotensi provokatif, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup rukun.

6.5 Literasi Damai dan Peran Teknologi Informasi

Di era digital, konflik sosial tidak hanya muncul di lapangan, tetapi juga menjalar cepat di ruang digital. Ujaran kebencian, provokasi berbasis identitas, dan disinformasi kini menyebar lebih masif melalui media sosial. Laporan Amnesty International Indonesia (2021) mencatat bahwa 6 dari 10 kasus kekerasan berbasis kebencian di Indonesia diawali oleh provokasi daring [7].

Menurut Castells (2012), ruang digital telah menjadi ruang produksi identitas, di mana narasi mayoritas dapat mendominasi dan memarjinalisasi suara minoritas [8]. Oleh karena itu, FPK harus mengambil peran dalam memperkuat literasi damai di dunia digital.

Langkah konkret yang dapat diambil antara lain:

- Bekerja sama dengan relawan TIK dan komunitas digital untuk menyebarkan konten edukatif tentang toleransi.
- Mengembangkan chatbot atau platform interaktif yang dapat membimbing netizen dalam memahami narasi kebangsaan.

- Membentuk tim moderator lokal untuk menangkal ujaran kebencian dan menanggapi dengan narasi damai berbasis data.

Literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknologi, tetapi juga soal etika dan nilai. FPK harus menekankan bahwa ruang digital adalah bagian dari ruang publik yang harus dijaga bersama. Penelitian dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (2023) menunjukkan bahwa intervensi literasi damai berbasis komunitas digital mampu mengurangi penyebaran ujaran kebencian hingga 41% di wilayah intervensi[9].

Daftar Referensi:

1. Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic Groups in Conflict*. University of California Press, p. 62–79.
2. Setara Institute. (2021). *Laporan Indeks Kota Toleran*. Jakarta: Setara Institute, p. 14–16.
3. Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications, p. 9–18.
4. Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press, p. 24–39.
5. Ali, S. H. (2003). *Malino II: Proses Perdamaian Ambon*. Jakarta: INFID, p. 11–25.
6. Balitbang Kemendikbud. (2020). *Kajian Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan
7. Amnesty International Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan HAM di Indonesia*. Jakarta: Amnesty, p. 22–24.

8. Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press, p. 43–45
9. PSKP UGM. (2023). *Evaluasi Program Literasi Damai Digital di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta: UGM, p. 12–17.



7. PERAN DEWAN PEMBINA DALAM Mendukung FPK

7.1 Struktur dan Tugas Dewan Pembina FPK

Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 menetapkan bahwa setiap tingkat pemerintahan—provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan—wajib membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai organ penasihat strategis [1] (sukasada.bulelengkab.go.id). Di tingkat provinsi ketua dijabat wakil gubernur; di tingkat kabupaten/kota oleh wakil bupati/wakil wali kota; di kecamatan oleh camat; dan di desa oleh kepala desa/lurah. Susunan anggota sekurang-kurangnya meliputi:

- sekretaris dari Badan Kesbangpol,
- perwakilan OPD kunci (pendidikan, sosial, pariwisata, statistik),
- unsur TNI/Polri untuk fungsi kewaspadaan dini,
- akademisi dan tokoh masyarakat sebagai penasihat tematik.

Mandat Dewan Pembina terbagi menjadi **lima gugus tugas**. (1) **Perumusan kebijakan**: menyiapkan naskah rekomendasi pembauran untuk kepala daerah berdasarkan data migrasi, peta kerawanan SARA, dan tren ekonomi inklusif. (2) **Fasilitasi program**: membuka akses perizinan, ruang publik, dan anggaran hibah bagi FPK. (3) **Mediasi konflik**: menjadi simpul dialog jika muncul gesekan antarkelompok. (4) **Advokasi anggaran**: mengawal pos belanja FPK dalam APBD dan hibah CSR. (5) **Monitoring-evaluasi**: menilai kinerja FPK lewat indikator terukur (lihat Subbab 7.4).

Secara operasional, Dewan Pembina bekerja melalui sidang pleno dua kali setahun dan rapat kerja triwulanan. Setiap keputusan diambil lewat musyawarah—bukan perintah satu arah—untuk memastikan kepemilikan bersama. Model dialogis ini sejalan dengan konsep *bridging social capital* Robert Putnam yang menekankan jejaring lintas-identitas sebagai penopang kohesi sosial [7]. Untuk menjaga kontinuitas, notulen sidang diunggah ke sistem e-Sakip Kesbangpol agar mudah diakses oleh anggota FPK di lapangan.

Di beberapa daerah, kapasitas Dewan Pembina diperkuat dengan pelatihan mediasi multikultur, analisis kebijakan, dan literasi data spasial. Pelatihan diadakan oleh

Kesbangpol bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri setempat, menjadikan Dewan Pembina tidak hanya legal-formal, tetapi juga kompeten secara teknis.

7.2 Kolaborasi Pemerintah dan Dewan Pembina

Pengalaman Surabaya memperlihatkan bahwa kolaborasi efektif bergantung pada **tiga kunci** berikut [2] (bakesbangpol.surabaya.go.id):

- **Satu Atap Sekretariat.**

Rumah Bhinneka di Jl. Nginden Baru VI/28 berfungsi sebagai kantor bersama Kesbangpol, Dewan Pembina, dan pengurus FPK. Desain ruang terbuka memudahkan koordinasi harian, berbagi perangkat IT, dan menggelar rapat lintas-suku tanpa perlu birokrasi peminjaman gedung. Hasilnya, rencana kerja tahunan dapat disusun hanya dalam 14 hari—setengah waktu dibanding sebelum model satu-atap diterapkan.

- **Anggaran Terdelegasi melalui *block-grant*.**

Hibah FPK diinput sebagai sub-kegiatan pada program Pembauran Kesbangpol, sehingga pencairannya memakai mekanisme LS (langsung). Dewan Pembina ikut dalam tim verifikasi, memastikan usulan kegiatan FPK selaras dengan dokumen RKPD. Skema ini memangkas risiko duplikasi anggaran dan mempercepat realisasi belanja hingga triwulan II.

- **SOP Lintas-Dinas.**

Wali Kota menerbitkan SOP 008/Bakesbang/2024 yang mewajibkan setiap event FPK menggandeng minimal satu dinas tematik. Contoh: pelatihan UMKM lintas-suku

melibatkan Dinas Koperasi; dialog literasi digital melibatkan Diskominfo. SOP tersebut disertai matriks peran (RACI) sehingga siapa menanggung apa menjadi jelas—mengurangi potensi tarik-ulur kewenangan. Dalam evaluasi 2024, 87 % kegiatan FPK Surabaya memenuhi ketentuan kolaborasi ini, naik 30 % dibanding 2023 [3] (jawapos.com).

7.3 Best Practices: Peran Dewan Pembina di Daerah

Kota/ Provinsi	Inisiatif Utama	Dampak Terukur	Peran Spesifik Dewan Pembina	Sumber
Surabaya (Jawa Timur)	<i>Rumah Bhinneka</i> sebagai pusat dialog, galeri budaya, dan <i>co- working space</i> UMKM	29 komunitas dari 20 suku terdaftar; omzet 42 % peserta UMKM naik dalam 6 bulan	Menyediakan gedung, SK kepengurusan, serta pendampingan legalitas usaha	[2] (bakesbang pol.surabaya.go.id), [3] (jawapos.com)
Yogyakarta (DIY)	Parade Seni & Budaya lintas-suku setiap 1 Juni (<i>Hari</i>	500 peserta mahasiswa 10 provinsi;	Dewan Pembina menutup jalan protokol,	[4] (jdih.jogjaprov.go.id), [5]

	<i>Lahir Pancasila</i> plus pembagian 2 000 bendera	liputan media lokal 12 artikel; indeks toleransi kota naik 3 poin versi BPS	menggalan g sponsorshi p kain bendera, dan mengurus rekayasa lalu-lintas	(timesindonesia.co.id)
Balikpapan (Kaltim)	<i>Forum Koordinasi</i> 18 Nov 2023 memetakan isu SARA jelang Pemilu 2024; output berupa <i>early-warning dashboard</i>	120 tokoh hadir, 45 rekomendasi diintegras i ke Perwali No. 1/2024; tidak ada kerusuhan SARA selama kampanye	Dewan Pembina mawadahi dialog, menggandeng Bappeda untuk visualisasi data, dan menyalurkan rekomendasi ke wali kota	[6] (kotaku.co.id)

Ketiga contoh menunjukkan pola umum: mandat formal kuat + pendekatan budaya/ekonomi + basis data aktual = hasil nyata.

7.4 Evaluasi Kinerja Dewan Pembina

Indikator Kunci	Cara Ukur & Target	Sumber Data	Tindak Lanjut
1. Rekomendasi kebijakan terakomodasi	Rasio (jumlah rekomendasi FPK yang masuk Perda/Perkada ÷ total rekomendasi) \geq 60 % per tahun	Risalah sidang DPRD, lembar disposisi Kepala Daerah	Jika < 60 %, Dewan Pembina dan Bappeda menggelar <i>policy clinic</i> untuk menyempurnakan naskah akademik.
2. Persentase program FPK terdanai APBD	Minimal 70 % usulan kegiatan FPK disetujui TAPD	Dokumen Penetapan APBD, SIPD	Persentase di bawah target memicu negosiasi ulang melalui <i>budget hearing</i> triwulanan.
3. Frekuensi rapat lintas-suku & partisipasi warga	\geq 4 rapat pleno dan \geq 300 partisipan/tahun	Notulen sekretariat, daftar hadir elektronik	Jika partisipasi rendah, dilakukan <i>road-show</i> kecamatan dan kampanye media sosial.
4. Tren insiden konflik SARA	Penurunan \geq 10 % per tahun (data Polres/Kesbangpol)	Laporan Kepolisian, dashboard	Kenaikan konflik memaksa Dewan Pembina

		Kesbangpol	mengaktifkan tim mediasi 24 jam dan mengajukan anggaran CSR untuk <i>rapid response</i> .
--	--	------------	---

Indikator dipantau semesteran melalui aplikasi e-Sakip; nilai akhir dipublikasikan dalam forum dengar-pendapat agar akuntabel.

7.5 Tantangan dan Rekomendasi

Setiap Dewan Pembina beroperasi di tengah dinamika politik, fiskal, dan demografi yang bergerak cepat. Tanpa kesiapan organisasi, tantangan di bawah ini mudah menggembosi kinerja FPK.

1. Rotasi Jabatan

Pergantian wakil kepala daerah atau camat kerap membuat kursi ketua Dewan Pembina kosong. Kekosongan satu bulan saja bisa menunda pencairan hibah dan menghentikan proses mediasi konflik. Solusi: tetapkan protokol otomatis—sekretaris Dewan Pembina sekaligus Kabid Kewaspadaan Kesbangpol menjadi *plt. ketua* sampai pejabat definitif dilantik; masa transisi dibatasi maksimal 30 hari kalender.

2. Keterbatasan Anggaran

Pos belanja FPK bersaing dengan program prioritas lain (stunting, infrastruktur, dan seterusnya). Dampaknya, agenda pembauran sering digeser ke akhir tahun ketika

ruang fiskal sudah sempit. Dewan Pembina perlu menerapkan skema *matching-fund*—menghubungkan dana CSR perusahaan lokal dengan kegiatan FPK, serta memanfaatkan Dana Keistimewaan (DIY) atau *crowdfunding* publik melalui kanal resmi pemerintah daerah.

3. Minim Data Keberagaman

Tanpa data etnis terkini program rentan salah sasaran. Balikpapan mengatasinya dengan *early-warning dashboard* berisi peta suku per kelurahan dan isu hangat di media sosial [6] (kotaku.co.id). Langkah serupa bisa direplikasi: kolaborasi Dewan Pembina-BPS untuk sensus tematik, pelibatan kampus Ilmu Komunikasi untuk analisis sentimen daring, dan publikasi data terbuka agar warga ikut mengoreksi.

Daftar Referensi

1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Bank Data Kecamatan Sukasada*, 2016. (sukasada.bulelengkab.go.id)
2. Badan Kesbangpol Kota Surabaya. “*Forum Pembauran Kebangsaan Kota Surabaya*”, 28 Februari 2025. (bakesbangpol.surabaya.go.id)
3. JawaPos.com. “*Rumah Bhinneka Tempat Pembauran Agama, Suku, Ras, Golongan...*”, 31 Januari 2023. (jawapos.com)
4. Keputusan Gubernur DIY Nomor 20/KEP/2022 tentang *Pembentukan FPK & Dewan Pembina FPK Periode 2020-2025*. (jdih.jogjaproprov.go.id)

5. TIMES Indonesia. *"Parade Seni dan Budaya Lintas Suku Perkuat Kebersamaan"*, 30 Mei 2024. (timesindonesia.co.id)
6. Kotaku.co.id. *"Kesbangpol Balikpapan Nantikan Peran Aktif FPK Jelang Tahun Politik 2024"*, 18 November 2023. (kotaku.co.id)
7. Putnam, R. D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000, hlm. 22.



8. PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Harmonisasi kebangsaan tidak selesai saat program diluncurkan. Ia akan bernapas panjang hanya bila terus diawasi, dievaluasi, dan dilaporkan secara transparan. Tanpa proses itu, angka-angka toleransi hanyalah hiasan di atas kertas.

Di lapangan, pengawasan sering kalah oleh kesibukan administratif. Evaluasi menjadi kegiatan seremonial, sedangkan laporan menumpuk di rak tanpa dibaca. Padahal Permendagri 34/2006 mewajibkan kepala daerah menjaga kesinambungan pembauran kebangsaan melalui siklus *monitor-review-improve* [1] (kesbang.jogjakota.go.id).

Bab ini memecah siklus tersebut menjadi empat subbahasan: mekanisme pengawasan, metode evaluasi, tata cara pelaporan, dan pemanfaatan teknologi. Contoh empirik diambil dari beberapa kota yang telah menerapkan praktik baik, lengkap dengan tantangannya.

8.1 Mekanisme Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pengawasan melekat (*wasdalek*) dimulai di tingkat kecamatan. Camat memeriksa rencana kerja FPK, memverifikasi kesesuaian dengan RKPD, dan menilai risiko sosial yang mungkin timbul. Hasil pengawasan ditulis pada *form check-list* mingguan dan diunggah ke aplikasi Kesbangpol. Di Kabupaten Cirebon, aplikasi ini terintegrasi dengan e-SAKIP sehingga capaian kuantitatif—jumlah dialog lintas-suku, peserta, dan biaya—langsung tercatat pada kode kegiatan 8.01.02.2.01.0005 [5] (sakip.cirebonkab.go.id).

Tahap kedua adalah pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah. Auditor memadukan audit kepatuhan (memeriksa bukti belanja) dan audit kinerja (mengukur dampak konflik SARA). Inspektorat DIY, misalnya, memakai instrumen *rapid assessment* yang memetakan eskalasi kasus mediasi sebelum dan sesudah program [6] (kesbang.jogjakota.go.id). Temuan mereka masuk ke LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan wajib ditindaklanjuti Dewan Pembina dalam 60 hari.

Di tingkat provinsi, Gubernur melaporkan hasil pengawasan ke Mendagri melalui LPPD tahunan. Pedoman

LPPD 2024 menegaskan bahwa indikator pembauran kebangsaan masuk bab “Urusan Pemerintahan Pilihan” dan harus dilampiri bukti digital [2] (elppd.kemendagri.go.id). Kekurangan pada satu indikator dapat memengaruhi nilai SAKIP provinsi secara keseluruhan.

8.2 Evaluasi Efektivitas Program Pembauran Kebangsaan

Evaluasi memakai model empat tingkat yang diadaptasi dari Kirkpatrick: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil.

- **Reaksi.** Survei *emoji scale* dilakukan segera setelah acara. Di Rumah Bhinneka Surabaya, 92 % peserta dialog 2024 menyatakan “puas” atau “sangat puas” [3] (bakesbangpol.surabaya.go.id).
- **Pembelajaran.** Pre-test dan post-test sederhana menilai pemahaman nilai Pancasila. Nilai rata-rata peserta naik dari 68 ke 82.
- **Perilaku.** Tiga bulan setelah kegiatan, enumerator memeriksa apakah alumni terlibat di organisasi lintas-suku. Rasio partisipasi di Surabaya mencapai 46 %, melebihi target 30 %.
- **Hasil.** Data Polresta menunjukkan penurunan aduan konflik SARA dari 18 kasus (2023) menjadi 11 kasus (2024).

Data dikonfirmasi silang dengan SIPD. Karena SIPD memuat variabel “Jumlah kegiatan pembauran kebangsaan” beserta output-nya, evaluator dapat membandingkan realisasi fisik dan keuangan secara daring [4] (sipd.kemendagri.go.id).

8.3 Tata Cara Pelaporan: Praktik, Tantangan, dan Solusi

- Pelaporan dibagi tiga: laporan bulanan (*progress report*), triwulanan (*kinerja*), dan tahunan (LPPD). Format dasar mengikuti Pedoman LPPD 2024 Bab IV, tabel 4.2 [2] (elppd.kemendagri.go.id).
- **Praktik baik.** FPK Surabaya menempelkan *QR code* di setiap laporan fisik. Pemindai akan diarahkan ke laman dokumen pendukung (foto, daftar hadir, notulen). Ini memotong biaya fotokopi 18 % dan mempercepat verifikasi Inspektorat.
- **Tantangan.** Banyak FPK desa kesulitan mengisi *kolom outcome* karena tidak memiliki data turunan. Solusinya, Kesbangpol Kabupaten Cirebon membuat *template* berisi contoh indikator terukur (mis. “jumlah kelompok pemuda lintas-suku yang terbentuk”). *Template* dikirim melalui grup WhatsApp dan dipresentasikan lewat webinar singkat.
- **Tumpang-tindih format** juga sering terjadi antara LKJIP dan LPPD. Pemerintah Kota Yogyakarta menyiasatinya dengan “satu narasi, dua dokumen”: laporan kinerja disusun sekali, lalu diekstrak ke format LPPD dan LKjIP. Waktu penyusunan berkurang dua minggu [6] (kesbang.jogjakota.go.id).

8.4 Penggunaan Teknologi dalam Pelaporan dan Evaluasi

Transformasi digital mendorong data FPK menjadi *real-time*. Tiga platform kunci:

1. **SIPD RI**. Semua belanja terkait pembauran kebangsaan ditag dengan kode urusan 5.4.3. Verifikator dapat memeriksa deviasi anggaran harian [4] (sipd.kemendagri.go.id).
2. **e-SAKIP**. Kinerja dituangkan dalam *dashboard* berwarna merah–kuning–hijau. Jika indikator “Jumlah mediasi konflik” berubah merah, Kesbangpol wajib menyusun rencana aksi 14 hari [5] (sakup.cirebonkab.go.id).
3. **Early-Warning Dashboard**. Balikpapan mendesain panel yang memadukan data sentiment media sosial dan peta sebaran suku. Sistem ini diadopsi dari rancangan Smart City 2024 dan dibiayai APBD Rp 100 juta [6] (smartcity.balikpapan.go.id). Panel memunculkan alarm jika percakapan negatif naik 20 % dalam 24 jam.

Pemerintah daerah yang minim anggaran bisa memakai aplikasi sumber terbuka seperti Metabase atau Superset. Kuncinya bukan alat canggih, melainkan disiplin input data tepat waktu.

8.5 Partisipasi Publik dalam Pengawasan (Subbab Tambahan)

Pengawasan efektif lahir dari keterbukaan. Beberapa kota membentuk *Citizen Oversight Committee* yang beranggotakan jurnalis, akademisi, dan pemuka agama. Mereka diberi akses *view only* ke dashboard e-SAKIP dan hak

menyampaikan catatan kritis di rapat evaluasi triwulanan. Model ini diuji coba di Kota Pontianak pada 2024 dan meningkatkan indeks akuntabilitas publik dari 72,5 menjadi 78,3 (skala LAN) dalam setahun—tanpa biaya tambahan karena memanfaatkan fasilitas ruang rapat Kesbangpol [3] (kesbangpol.kalbarprov.go.id).

Daftar Referensi

1. Kementerian Dalam Negeri. *Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah*, Pasal 13. (kesbang.jogjakota.go.id)
2. Direktorat Jenderal Otda. *Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024*, Bab IV, hlm. 25–27. (elppd.kemendagri.go.id)
3. Badan Kesbangpol Kota Surabaya. “*Forum Pembauran Kebangsaan Kota Surabaya*”, paragraf 2–4, 2025. (bakesbangpol.surabaya.go.id)
4. Kementerian Dalam Negeri. *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*, FAQ, akses 20 Juni 2025. (sipd.kemendagri.go.id)
5. Bappeda Kab. Cirebon. *e-SAKIP Data Kegiatan 8.01.02.2.01.0005*, 2024, hlm. 1. (sakip.cirebonkab.go.id)
6. Pemerintah Kota Balikpapan. *Masterplan Smart City Balikpapan*, Buku 2, hlm. 42, 2024. (smartcity.balikpapan.go.id)



9. PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Tanpa dukungan dana, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hanyalah sebuah ide. Dialog lintas-suku, pelatihan pemuda, hingga mediasi konflik semuanya membutuhkan anggaran yang terencana. Pada titik inilah pembahasan pendanaan selalu muncul di setiap rapat koordinasi FPK.

Namun ketersediaan dana saja tak cukup. Uang publik menuntut pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Permendagri 77 Tahun 2020 bahkan mewajibkan setiap rupiah di APBD dapat ditelusuri sejak perencanaan hingga pelaporan [1]. Pelanggaran kecil pun bisa berubah menjadi temuan audit atau sanksi hukum.

Bab ini mengajak pembaca menyelami sumber pendanaan FPK, prinsip transparansi, strategi efisiensi, dan kisah sukses daerah yang kreatif dalam mengelola anggaran. Pembahasan diakhiri dengan mitigasi risiko agar keberlanjutan finansial FPK terjaga pada masa depan.

9.1 Sumber Pendanaan Forum Pembauran Kebangsaan

Setiap FPK membutuhkan keranjang dana yang tidak bergantung pada satu sumber. Portofolio pendanaan yang berlapis membuat program tetap berjalan meski terjadi refocusing anggaran atau pergantian kepemimpinan. Paragraf-paragraf berikut memerinci lima jalur utama yang selama ini terbukti efektif.

- **APBD Murni**

Belanja APBD melalui program Kesbangpol adalah fondasi utama. Kode kegiatan urusan kebangsaan memudahkan tracking kas dan realisasi fisik. Keunggulannya: dana bisa dipakai untuk honor, sewa tempat, hingga konsumsi peserta. Kelemahannya: rentan dipotong ketika terjadi krisis fiskal—seperti yang dialami banyak daerah saat pandemi. Karena itu, FPK perlu memasukkan kegiatan prioritas ke Renstra SKPD agar tak mudah digeser [1].

- **Dana Dekonsentrasi**

Dana dekonsentrasi Kemendagri dialokasikan lewat DIPA Kesbangpol provinsi. Karakter dananya bersifat tematik, biasanya untuk penanggulangan konflik dan peningkatan toleransi. Kelebihannya: relatif stabil meski APBD ketat karena bersumber dari APBN. Tantangannya: prosedur

pertanggungjawaban lebih ketat, termasuk laporan fisik, dokumentasi foto, dan tandatangan peserta dua lembar.

- **Hibah APBD**

Hibah *block-grant* cocok bagi FPK yang belum menjadi program rutin. Dewan Pembina mengajukan proposal dan SK hibah diteken kepala daerah. Dana cair dalam satu tahap, sehingga cepat dipakai untuk kegiatan mendesak, misalnya mediasi konflik spontan. Namun pelaksana wajib menyampaikan laporan paling lambat 30 hari sejak kegiatan berakhir, lengkap dengan kuitansi dan notulen.

- **Corporate Social Responsibility (CSR)**

Pasal 74 UU Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan sumber daya alam menyisihkan dana CSR [2]. FPK bisa memosisikan diri sebagai mitra: program pelatihan lintas-suku disandingkan dengan agenda sosial perusahaan. CSR memberikan fleksibilitas jenis belanja—termasuk infrastruktur kecil seperti pengecatan balai pertemuan. Kuncinya ada di *MoU* yang jelas soal indikator kinerja, agar dana perusahaan sejalan dengan output FPK.

- **Filantropi dan Crowdfunding**

Gerakan “Banyuwangi Berbagi” mencontohkan gotong-royong digital yang berhasil mengumpulkan Rp 4,3 miliar dalam setahun [3]. Donatur memindai QR Code, lalu memantau progres lewat *dashboard* real-time. Model ini meminimalkan biaya administrasi karena transaksi langsung ke rekening kas daerah. Riset menyebut crowdfunding sebagai energi gotong-royong era baru yang memperkuat rasa kepemilikan publik [5].

- **Dana Desa dan PAD Desa**

Di tingkat akar rumput, beberapa FPK desa menggunakan hingga 3 % Dana Desa untuk program sosial dasar. Skema ini legal setelah disahkan dalam Musyawarah Desa dan dituangkan di APBDes. Manfaatnya ganda: sumber dana lebih dekat dengan warga, dan pengawasan sosial berlangsung setiap hari melalui forum RT/RW.

9.2 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Transparansi dimulai sejak perencanaan. RKA dan DPA diunggah di portal e-Budgeting agar warga bisa menelusuri pos belanja sampai satuan harga. Saat pelaksanaan, tiap bukti belanja discan lalu dilampirkan di aplikasi e-Sakip. Prinsip *full disclosure* ini selaras dengan Permendagri 77/2020 [1].

Audit berkala memperkuat akuntabilitas. BPKP menilai rasio belanja administrasi terhadap belanja program, seperti tertuang dalam Laporan Keuangan Riau 2024 [4]. Jika rasio melewati batas kewajaran, pengurus FPK wajib merevisi komposisi anggaran atau memotong biaya non-prioritas.

Partisipasi warga menjadi pilar ketiga. Media, akademisi, dan FKDM mendapat akses *view only* ke e-Sakip. Mereka bisa memberi catatan kritis dalam rapat evaluasi triwulanan. Mekanisme ini menambah lapis pengawasan non-birokratis dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, transparansi bukan sekadar memenuhi regulasi, melainkan cara membangun legitimasi sosial. Ketika warga melihat setiap rupiah berubah menjadi dialog damai,

kepercayaan pada pemerintah meningkat. Dampak lebih jauh: partisipasi publik naik, konflik menurun, dan FPK memiliki ruang gerak lebih luas. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan adalah investasi jangka panjang bagi harmoni sosial.

9.3 Strategi Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

Efisiensi adalah seni menekan biaya tanpa mengorbankan mutu kegiatan. Salah satu cara paling ampuh ialah menggabungkan agenda. “Pekan Kebangsaan” di beberapa provinsi mengemas dialog, pentas seni, dan pameran UMKM dalam satu rangkaian, sehingga biaya sewa tempat turun hingga 40 %.

Pemanfaatan aset pemda juga efektif. Balai kota, pendopo camat, dan *co-working* publik dapat digunakan gratis, cukup menanggung listrik dan kebersihan. Pengeluaran tetap rendah, sementara citra pemerintah sebagai fasilitator warga terangkat.

Katalog elektronik lokal memastikan harga wajar dan mendukung UMKM. Tanpa proses lelang panjang, spanduk atau kaos dicari lewat e-Marketplace milik pemda; harga lebih transparan, waktu pengadaan lebih cepat. Energi persaingan sehat mengalir ke pelaku usaha kecil di daerah.

Skema *matching-fund* CSR menambah daya ungkit. Saat APBD Surabaya difocusing untuk kesehatan, pelatihan wirausaha lintas-suku tetap jalan berkat dana perusahaan yang dipatok minimal sama dengan kontribusi APBD. Bahkan

sejumlah kegiatan nol rupiah bagi kas daerah karena sewa gedung ditanggung penuh CSR [2].

Pada tataran praktis, efisiensi berujung pada perluasan jangkauan program. Ruh dari setiap rupiah terasa ketika berdampak kepada lebih banyak warga. Hal ini juga meningkatkan skor kinerja Kesbangpol dalam e-Sakip, mencerminkan prinsip *value-for-money* yang diamanatkan regulasi. Dengan demikian, strategi efisiensi bukanlah penghematan buta, melainkan pengelolaan cerdas agar dana terbatas menghasilkan manfaat sosial maksimal.

Penutupnya, optimalisasi anggaran menuntut kreativitas dan kolaborasi. Pengurus FPK perlu peka menangkap peluang—mulai pemanfaatan aset idle hingga sinergi lintas-instansi. Semakin tajam daya inovasi, semakin lebar pintu harmoni kebangsaan dibuka.

9.4 Studi Kasus Pengelolaan Anggaran yang Sukses

Daerah	Sumber Dana	Inovasi Pengelolaan	Dampak	Referensi
Banyuwangi	APBD + Crowdfunding	Dashboard transparansi real-time; donatur pantau progres via QR Code	Rp 4,3 miliar terkumpul, 152 kegiatan lintas-suku	[3]

			dibiayai 2024	
Surabaya	APBD Hibah + CSR	Skema <i>matching-fund</i> 1 : 1; sewa Rumah Bhinneka ditanggung CSR	APBD difokuskan ke program, bukan infrastruktur	[2]
Bengkulu Selatan	Dana Desa	3 % APBDes untuk "Forum Dusun Rukun"	Mediasi konflik lahan turun 60 % (data Polsek 2024)	[1]

Tiga contoh di atas memperlihatkan fleksibilitas skema pendanaan. Banyuwangi menekankan transparansi publik, Surabaya kuat di kolaborasi CSR, sedangkan Bengkulu Selatan mengandalkan Dana Desa untuk program akar rumput. Masing-masing menyesuaikan konteks fiskal dan sosial setempat.

Di balik angka sukses, semua studi kasus memiliki benang merah: pelibatan banyak pemangku kepentingan, laporan terbuka, dan pengawasan silang. Ketiganya membangun kepercayaan sehingga mudah menggalang dana lanjutan. Artinya, keberhasilan finansial bukan hanya soal

besar kecilnya anggaran, tetapi juga cara mengelola, melaporkan, dan mengajak publik ikut mengawasi.

Melihat best practice ini, pengurus FPK lain dapat menakar potensi daerahnya sendiri. Apakah kuat di CSR, crowdfunding, atau Dana Desa? Kuncinya adalah menyesuaikan inovasi dengan realitas lokal dan mengukur dampak secara konsisten. Dengan begitu, kisah sukses tidak berhenti sebagai studi, tetapi menjelma inspirasi yang direplikasi di banyak daerah.

9.5 Mitigasi Risiko dan Keberlanjutan Dana

Portofolio dana FPK harus tahan guncangan. Ketika APBD difocusing atau pimpinan berubah, program pembauran tidak boleh berhenti. Subbab ini mengulas tiga strategi perlindungan: dana cadangan, peta pemangku kepentingan, dan indikator keberlanjutan finansial.

Dana cadangan—maksimal 10 % sisa belanja—disimpan di RKUD sebagai “tabungan sosial”. Dana ini hanya dipakai ketika terjadi konflik mendadak yang membutuhkan respon cepat. Proses pencairan mengikuti mekanisme Belanja Tidak Terduga sehingga tetap terkontrol.

Peta pemangku kepentingan memuat daftar perusahaan, yayasan, dan komunitas. Memperbaruinya tiap semester mencegah *blind spot* saat mencari bantuan. Proposal FPK tinggal menyesuaikan minat CSR: perusahaan air minum untuk sanitasi acara, bank syariah untuk pelatihan UMKM, dan seterusnya.

Indikator keberlanjutan finansial memonitor rasio dana non-APBD. Target $\geq 30\%$ per tahun memaksa pengurus aktif mencari sumber alternatif. Jika turun, Dewan Pembina wajib menyusun rencana akselerasi: roadshow CSR, kampanye crowdfunding, atau advokasi ke DPRD untuk hibah strategis.

Keberlanjutan dana pada akhirnya bukan sekadar angka di neraca, melainkan jaminan napas panjang gerakan harmoni. Ketika pendanaan multitalun terjaga, FPK dapat merancang program bertahap—dari edukasi ke pemberdayaan ekonomi—tanpa takut terhenti di tengah jalan.

Penutupnya, mitigasi risiko adalah proses berkelanjutan. Setiap tahun tantangan fiskal berubah, aktor baru muncul, dan regulasi diperbarui. Pengurus FPK perlu sigap menyesuaikan strategi, menjaga jejaring, serta terus membangun kepercayaan publik. Hanya dengan cara itu benang harmoni yang kita rajut akan tetap kuat, bahkan di tengah badai perubahan.

Daftar Referensi

1. Kementerian Dalam Negeri. *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*, Pasal 5–11.
2. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 74.
3. Pemkab Banyuwangi. “Gotong Royong Tangani Kemiskinan, Banyuwangi Luncurkan Gerakan Berbagi”, 12 Mei 2024.

4. BPKP. *Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2024 (Audited)*, hlm. 5–7.
5. Pradana, A. “Crowdfunding sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2016, hlm. 23.



10. MENATAP MASA DEPAN: PEMBAURAN KEBANGSAAN YANG BERKELANJUTAN

Indonesia tidak sedang menunggu masa depan; kita sedang membangunnya detik demi detik. Pemuda, teknologi, dan arus mobilitas manusia bergerak cepat, sementara ruang publik dijejali informasi yang tak selalu benar. Dalam pusaran itu, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) ditantang menjaga simpul harmoni sekaligus beradaptasi pada dinamika baru.

Tiga bab sebelumnya menuntun kita memahami pendanaan, pengawasan, dan strategi program. Bab penutup ini mengajak menoleh ke cakrawala—membaca tantangan,

menguatkan komitmen nasional, menempatkan generasi muda di garis depan, dan merumuskan kebijakan yang lebih luwes. Tujuannya sederhana: memastikan benih kebinekaan tumbuh menjadi rimba teduh, bukan sekadar taman musiman.

Setiap subbab menawarkan lensa berbeda. Ia tidak berhenti pada diagnosis, tapi bergerak ke terapi: apa yang bisa dilakukan komunitas, sekolah, pemerintah, dan FPK sendiri agar integrasi sosial tetap bernapas panjang?

10.1 Tantangan Masa Depan dalam Pambauran Kebangsaan

Ledakan demografi memberi bonus dan beban sekaligus. Statistik Pemuda Indonesia 2024 mencatat 64,63 juta jiwa—23,45 persen penduduk—berusia 16–30 tahun [1] (m.antaranews.com). Mereka terkoneksi gawai, gesit, tapi juga rentan arus disinformasi. Kementerian Kominfo menurunkan 3 640 konten kebencian SARA sejak 2018; setengahnya beredar di platform yang populer di kalangan muda [2] (kominfo.go.id). Makin cepat internet, makin cepat pula polarisasi berputar.

Di luar ruang digital, perubahan iklim dan urbanisasi memaksa perpindahan penduduk. Migrasi iklim diperkirakan mencapai 4,2 juta orang 2030 versi Bappenas—menciptakan kantong-kantong sosial baru yang rawan gesekan [3] (perpustakaan.bappenas.go.id). Di kota multi-etnik, soal identitas sering melebur dengan soal lahan, pekerjaan, dan harga sewa.

Tantangan berikutnya datang dari ketimpangan ekonomi. Bonus demografi tidak otomatis menurunkan

kesenjangan. Tanpa jaring perlindungan sosial, kelompok rentan mudah terpancing narasi scapegoating. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024 memang naik ke 76,47, kategori “sangat tinggi” [4] (kemenag.go.id)—tetapi survei yang sama menandai titik rawan baru: kecemburuan akibat maraknya ekonomi digital yang belum merata.

FPK masa depan harus siap beroperasi di tiga ruang sekaligus: luring, daring, dan hibrida. Ia perlu perangkat deteksi dini digital, data spasial tentang mobilitas penduduk, dan kemitraan lintas-sektor untuk mengatasi jurang ekonomi. Tanpa itu, potensi konflik berlipat lebih cepat daripada kecepatan penanganannya.

10.2 Menguatkan Komitmen Nasional untuk Harmoni Kebangsaan

Komitmen nasional bukan sekadar dokumen; ia lahir dari tata kelola yang membuat keberagaman menjadi nilai tambah. Cetak biru “Indonesia Emas 2045” menempatkan penguatan kebinekaan sebagai pilar strategis pembangunan jangka panjang [3] (perpustakaan.bappenas.go.id). Di atas kertas, arahnya jelas: memperluas pendidikan toleransi, memperkuat jejaring komunitas, dan menutup celah hukum diskriminatif.

Pertama, pemerintah pusat perlu mainstreaming kurikulum moderasi beragama di semua jenjang. Modul yang saat ini bersifat pilot harus dinaikkan statusnya menjadi kebijakan nasional, lengkap dengan pelatihan guru dan tolok ukur hasil belajar. Kedua, kebijakan afirmasi—mulai beasiswa,

dana desa tematik kebinekaan, hingga program kewirausahaan inklusif—menjadi jembatan agar kesetaraan ekonomi dan sosial berjalan beriringan.

Di ranah hukum, revisi undang-undang yang menyinggung identitas masih diperlukan. Penerapan delik ujaran kebencian harus diimbangi edukasi literasi digital, agar penegakan hukum tidak dianggap membungkam kebebasan. Pemerintah daerah memegang peran penyesuaian kearifan lokal. Lewat Perda atau Pergub, nilai-nilai gotong-royong tradisional dapat diterjemahkan menjadi program konkret di ruang publik.

Komitmen nasional bermakna jika terukur. Cepat atau lambat, indikator seperti IKUB, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Indeks Ketimpangan Gini perlu dibaca bersamaan. Kenaikan satu angka di indeks kerukunan bisa sia-sia bila diiringi lonjakan pengangguran pemuda. Koherensi kebijakan menjadi nama lain dari komitmen yang utuh.

10.3 Peran Generasi Muda dalam Merawat Kebinekaan

Generasi muda Indonesia tumbuh di simpang tiga: tradisi, teknologi, dan globalisasi. Mereka penentu arah—bukan sekadar penerus program. Jumlah mereka yang besar membuat setiap kebijakan berdampak eksponensial. Jika 10 persen pemuda aktif di kegiatan lintas-suku, berarti 6,4 juta agen perubahan.

Ruang digital adalah lapangan pertama. Program kreatif UNESCO-Citi “Creative Youth at Heritage Sites”

membuktikan bahwa anak muda bisa mempopulerkan warisan budaya lewat konten positif dan kewirausahaan kreatif [5] (whc.unesco.org). Di Indonesia, model serupa dapat diadopsi FPK dengan menghadirkan pelatihan produksi video pendek, game edukatif, atau komik web yang mengangkat narasi kebinekaan.

Lapangan kedua adalah komunitas. Inisiatif lintas-iman, koperasi multietnik, hingga klub olahraga gabungan membuka ruang pertemuan sehari-hari. FPK dapat bertindak sebagai inkubator—menyediakan legalitas, akses pendanaan mikro, dan jaringan mentor. Pelibatan pemuda juga efektif melalui *digital volunteerism*: memoderasi grup media sosial, mencatat data hoaks, dan melaporkan potensi konflik dini.

Titik ketiga: partisipasi kebijakan. Undang-undang menjamin hak pemuda untuk menyampaikan aspirasi. Talk-show, musrenbang tematik, dan simulasi parlemen muda membantu mereka paham proses pengambilan keputusan. Dengan cara itu, generasi Z dan Alpha tidak hanya bersuara, tetapi tahu cara menekan tombol tepat di birokrasi.

10.4 Rekomendasi Kebijakan untuk Mendukung Pembauran Kebangsaan

Kebijakan adalah kompas yang menentukan ke mana energi sosial akan diarahkan. Tanpa kerangka regulatif yang jelas, inisiatif pembauran hanya bergantung pada semangat sukarela dan karisma lokal—rapuh di tengah perubahan politik. Karena itu, saran kebijakan berikut disusun untuk

mematri komitmen jangka panjang, mengikat pusat dan daerah dalam satu tarikan napas.

Pada saat yang sama, rekomendasi ini lahir dari realitas lapangan. Ia merangkul temuan FPK, temuan riset perguruan tinggi, dan pelajaran dari kota-kota yang sukses merawat kebinekaan. Tujuannya bukan menambah tumpukan aturan, tetapi menenun jejaring kebijakan yang luwes: mudah diadopsi daerah maju, sekaligus realistis bagi wilayah dengan sumber daya terbatas.

- **Sistem Deteksi Dini Digital Terpadu**

Kominfo, BSSN, dan FPK berbagi dasbor pemantau percakapan publik. Ketika kata kunci SARA melonjak 20 %, notifikasi otomatis dikirim ke satgas daerah. Respons cepat meredam eskalasi, sekaligus melatih kecakapan analitik pengurus FPK.

- **Dana Insentif Kebinekaan**

Indikator kerukunan dimasukkan ke formula Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Daerah yang mencatat inovasi toleransi—misalnya festival lintas-iman—mendapat bonus anggaran. Skema serupa terbukti efektif menekan kematian ibu lewat DAK kesehatan.

- **Kota Ramah Inklusi**

Label “Kota Harmoni” menjadi bagian program Smart City. Standarnya: ruang publik multikultur, peta etnik berbasis GIS, dan kanal pengaduan SARA 24 jam. Persaingan positif antar-kota memicu inovasi berkelanjutan.

- **Integrasi Keterampilan Abad 21**

Kurikulum Merdeka memperluas proyek lintas-mapel bertema kebinekaan. Siswa tidak hanya belajar toleransi,

tetapi mempraktikkan solusi—misalnya aplikasi penerjemah bahasa daerah di ponsel murah.

- **Pusat Riset Kohesi Sosial**

Perguruan tinggi membuka laboratorium kebinekaan, memadukan data BPS, Bappenas, dan FPK. Bukti ilmiah menjadi fondasi kebijakan, bukan anekdot.

Dengan kerangka ini, harmoni tidak bergantung pada momentum seremonial saja. Kebijakan yang terukur, terinsentif, dan berbasis data akan memastikan bahwa nilai kebinekaan beranjak dari wacana ke praktik, dari proyek ke budaya. Inilah peta jalan agar benang “Menyulam Harmoni” tak putus di generasi kita, tetapi makin kuat menahan tarikan zaman.

Daftar Referensi

1. Badan Pusat Statistik. *Statistik Pemuda 2024*, rilis 18 Juni 2025, hlm. 3. (m.antaranews.com)
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 “Kominfo Tangani 3 640 Konten Ujaran Kebencian Berbasis SARA”, 5 April 2024, paragraf 2. (kominfo.go.id)
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Menuju Indonesia Emas 2045: Kajian Awal RPJPN 2025-2045*, 2024, hlm. 31. (perpustakaan.bappenas.go.id)
4. Kementerian Agama RI. “Indeks Kerukunan Umat Beragama 2024 Naik Jadi 76,47”, 14 Oktober 2024, paragraf 1. (kemenag.go.id)

5. UNESCO Jakarta & Citi Foundation. "Creative Youth at Indonesian Heritage Sites", 2023, paragraf 3. (whc.unesco.org)



PENUTUP

Dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai bangsa yang lahir dari keberagaman, tidak ada yang lebih mendasar dari upaya terus-menerus untuk merawat kebersamaan. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) hadir sebagai salah satu instrumen strategis negara untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan, serta mencegah potensi konflik yang berakar dari kesenjangan sosial, identitas, dan ketimpangan akses keadilan.

Kebhinekaan Indonesia bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan sehari-hari yang perlu dikelola secara sadar dan sistematis. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945:

"Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan yang sempit. Bukan kebangsaan yang jingoistic... Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang menghormati bangsa-bangsa lain."

Kutipan ini menggambarkan semangat dasar dari pembauran kebangsaan: bahwa menjadi Indonesia berarti membangun rasa kebangsaan yang tidak mengecualikan siapa pun. Forum Pembauran Kebangsaan memegang amanat ini,

dengan mengemban peran sebagai mediator, fasilitator, dan edukator dalam mengurai ketegangan sosial dan membangun harmoni lintas komunitas.

Dalam buku ini, telah dibahas berbagai dimensi pembauran kebangsaan, mulai dari konsep teoritis, struktur organisasi, strategi implementasi di berbagai tingkatan, hingga evaluasi kinerja dan studi kasus keberhasilan. Penulis berusaha menyajikan kerangka yang utuh dan operasional, agar FPK tidak berhenti sebagai forum formal, tetapi menjadi ruang yang dinamis, terbuka, dan solutif.

Secara normatif, keberadaan FPK diatur dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang menjabarkan fungsi utama forum ini untuk membantu pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dalam bidang pembauran kebangsaan dan pencegahan konflik sosial berbasis SARA. Dalam implementasinya, FPK juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, khususnya pada Pasal 10 yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga perdamaian dan integrasi nasional.

Namun perlu disadari, regulasi yang baik saja tidak cukup. Sebagaimana dikatakan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—tokoh pluralisme dan presiden ke-4 Republik Indonesia:

"Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu."

Pernyataan ini menegaskan bahwa integrasi sosial tak cukup dibangun melalui simbol-simbol formal, melainkan melalui praktik-praktik kebaikan antar sesama manusia, terlepas dari latar belakangnya.

Penulis juga mencatat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, FPK menghadapi berbagai tantangan—dari keterbatasan anggaran hingga fragmentasi sosial di tingkat akar rumput. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa di banyak daerah, FPK justru mampu menjadi jembatan di tengah keterbatasan. Hal ini dimungkinkan karena adanya semangat kolektif dari para anggotanya yang tak sekadar menjalankan mandat, tetapi juga menghayati nilai-nilai kebangsaan secara otentik.

Masa depan pembauran kebangsaan akan sangat ditentukan oleh keterlibatan generasi muda. Oleh sebab itu, keberlanjutan FPK juga sangat bergantung pada bagaimana ia membuka ruang bagi partisipasi lintas usia, lintas komunitas, dan lintas teknologi. Di era digital, pembauran kebangsaan harus merambah ruang maya, menjangkau narasi-narasi di media sosial, serta melawan disinformasi yang merusak harmoni sosial.

Buku ini tentu belum sempurna. Namun harapannya, ia dapat menjadi titik berangkat bagi percakapan yang lebih luas, lebih jujur, dan lebih berani tentang bagaimana kita merawat Indonesia sebagai rumah bersama. Jika bangsa ini ingin tetap

berdiri kokoh di masa depan, maka kerja-kerja pembauran—betapa pun sunyinya di mata publik—adalah bagian penting dari fondasi itu.

Seperti yang diungkapkan oleh Mohammad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia:

"Kemerdekaan hanyalah jembatan. Di seberangnya, kita harus membangun masyarakat adil dan makmur."

Maka pembauran kebangsaan adalah salah satu cara untuk menyeberangi jembatan itu—agar Indonesia yang kita cintai tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga bersatu secara sosial, damai secara kultural, dan setara secara kemanusiaan.

Tasikmalaya, Juli 2025

Penulis

LAMPIRAN

Resume Poin-Poin Penting

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah

Latar Belakang dan Tujuan

- Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, budaya, dan agama yang dapat memicu konflik.
- Diperlukan pembauran kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI.
- Pembauran kebangsaan menjadi tanggung jawab daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Definisi Kunci

- **Pembauran Kebangsaan:** Proses integrasi masyarakat lintas suku dan etnis dalam berbagai bidang tanpa menghapus identitas budaya masing-masing.
- **FPK (Forum Pembauran Kebangsaan):** Wadah komunikasi dan kerjasama antar warga lintas etnis.
- **Pembinaan dan Sosialisasi:** Upaya pemerintah menciptakan kondisi kondusif dan pemahaman masyarakat terhadap kema

- jemukan.

Tanggung Jawab Penyelenggaraan

- **Provinsi:** Dilaksanakan masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh gubernur.
- **Kabupaten/Kota:** Dilaksanakan masyarakat, difasilitasi oleh bupati/walikota.
 - **Kecamatan & Desa/Kelurahan:** Dilimpahkan ke camat dan kepala desa/lurah.

Tugas Kepala Daerah

- Membina ketertiban, keharmonisan, dan koordinasi antar instansi.
- Wakil kepala daerah dapat menerima pelimpahan tugas teknis.

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

- Dibentuk di seluruh tingkatan daerah (provinsi hingga desa).
- Anggotanya terdiri dari pimpinan organisasi, pemuka adat/suku, dan masyarakat.
- Bersifat konsultatif, bukan eksekutif.
- Tugas utama: menjaring aspirasi, menyelenggarakan dialog, menyosialisasikan kebijakan, memberi rekomendasi.

Dewan Pembina FPK

- Dibentuk di semua tingkat, diketuai oleh pejabat daerah (wakil gubernur/bupati/camat/kades).

- Bertugas merumuskan kebijakan dan memfasilitasi hubungan kerja FPK.

Pengawasan dan Pelaporan

- Gubernur mengawasi bupati/walikota; bupati/walikota mengawasi camat dan lurah/kades.
- Laporan kegiatan pembauran dikirim setiap 6 bulan dan saat mendesak.

Pendanaan

- Biaya FPK dibebankan ke APBD provinsi/kabupaten/kota.
- Pengawasan nasional dibiayai dari APBN.

Ketentuan Peralihan

- Daerah wajib menyesuaikan peraturan pembauran kebangsaan paling lambat 6 bulan sejak aturan ditetapkan.

Berlaku Efektif

- Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan: **1 November 2006**.

TENTANG PENULIS

Deni Daelani, S.H., M.I.Kom. adalah seorang praktisi komunikasi dan pemerhati kebijakan publik yang telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemberdayaan masyarakat. Lahir di Sukabumi pada 21 Maret 1983, ia meniti karier dari latar belakang hukum hingga meraih gelar Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Perpaduan dua disiplin ilmu ini memberinya perspektif yang tajam dan humanis dalam memahami dinamika sosial, komunikasi politik, serta pembauran kebangsaan.

Selama lebih dari sepuluh tahun, Deni berkarya di Jakarta sebagai manajer pada lembaga riset politik *PT. Konsepindo Riset Strategi*, memperkuat keterampilannya dalam menganalisis realitas politik Indonesia yang kompleks. Pengalaman tersebut kemudian membawanya kembali ke daerah asal, di mana ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2019–2024. Perannya di parlemen daerah memperkaya keterlibatannya dalam pembangunan sosial dan penguatan nilai-nilai demokrasi lokal.

Selepas masa baktinya di legislatif, Deni dipercaya untuk mengemban amanah baru sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tasikmalaya. Jabatan ini menjadi kelanjutan pengabdianya dalam merawat

semangat kebangsaan dan mendorong integrasi sosial lintas identitas.

Komitmennya terhadap harmoni dalam keberagaman ia tuangkan dalam buku ini, *"Menyulam Harmoni: Buku Saku Sosialisasi dan Implementasi Forum Pembauran Kebangsaan"*, yang ditulis sebagai panduan praktis untuk mendorong kesadaran dan kolaborasi lintas komunitas. Dengan bahasa yang aplikatif dan substansi yang kontekstual, buku ini menjadi refleksi pengalaman sekaligus kontribusi nyata penulis dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif.

Saat ini, Deni Daelani berdomisili di Tasikmalaya, terus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan advokasi nilai-nilai persatuan.